

**PENGARUH MEKANISME *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN  
UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP *TAX AVOIDANCE* PADA SEKTOR  
ENERGY DAN BASIC MATERIALS YANG TERDAFTAR DI BURSA  
EFEK INDONESIA  
PADA TAHUN 2018-2021**

Oleh :

Nama : Sheila Stevanny

Nim : 31199125

Karya Akhir

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk  
memperoleh gelar Sarjana Akuntansi

Program Studi Akuntansi

Konsentrasi Akuntansi Perpajakan



**KWIK KIAN GIE**  
SCHOOL OF BUSINESS

**INSTITUT BISNIS dan INFORMATIKA KWIK KIAN GIE**

**JAKARTA**

**Maret 2023**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## PENGESAHAN

# **PENGARUH MEKANISME *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* PADA SEKTOR ENERGY DAN BASIC MATERIALS YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PADA TAHUN 2018-2021**

**Diajukan oleh:**

**Nama : Sheila Stevanny**

**Nim : 31199125**

**Jakarta, 15 Maret 2023**

**Disetujui Oleh :**

**Pembimbing**

**(Rizka Indri Arfianti S.E.,AK.,M.M.,M.AK.)**

**INSTITUT BISNIS dan INFORMATIKA KWIK KIAN GIE**

**JAKARTA 2023**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## ABSTRAK

Sheila Stevanny / 31199125 / 2023 / Pengaruh Mekanisme *Good corporate governance* dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax avoidance* pada Perusahaan Sektor Energy dan Basic Materials yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018 – 2021 / Dosen Pembimbing : Rizka Indri Arianti, S.E., Ak., M.M., M.Ak.

Keberadaan pajak menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar di Indonesia, sehingga pemerintah mengharapkan bagi wajib pajak untuk membayar pajak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Sedangkan bagi perusahaan pajak merupakan beban yang dapat mengurangi laba perusahaan sehingga perusahaan akan semaksimal mungkin untuk menekan pembayaran pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku, yaitu manajemen pajak dengan melaksanakan *tax avoidance*. *Tax avoidance* merupakan cara penghindaran pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku dengan memanfaatkan celah. Tuntutan perusahaan dalam melaksanakan *tax avoidance* harus dibawah pengawasan yang tepat menjadikan terbentuknya mekanisme *good corporate governance*. Penelitian bertujuan untuk mengetahui mekanisme *good corporate governance* dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini berdasarkan teori keagenan. Teori keagenan menjelaskan mengenai adanya perbedaan kepentingan dan sifat egoisme dalam diri manusia sehingga terdapat perbedaan kepentingan antara agent dan *principal*. Keadaan tersebut membuat adanya ketidakseimbangan informasi yang disebut sebagai asimetri informasi.

Data sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor energy dan basic materials yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018 – 2021. Pengumpulan data sampel dilakukan dengan *purposive sampling method* dan diperoleh sebanyak 40 data sampel. Pada penelitian ini, data sampel yang digunakan akan diuji melalui pengujian kesamaan koefisien untuk mengetahui apakah pooling data dapat dilakukan, analisis statistic deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, dan pengujian hipotesis.

Hasil penelitian berdasarkan uji t, diperoleh hasil signifikansi pada dewan komisaris independen dan kepemilikan institusional masing – masing sebesar 0,336 dan 0,222 sehingga  $H_1$  dan  $H_2$  ditolak. Namun, hasil signifikansi komite audit dan ukuran perusahaan masing – masing sebesar 0,008 dan 0,032 sehingga  $H_3$  dan  $H_4$  dapat diterima. Sedangkan melalui uji F diperoleh hasil secara simultan dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa dewan komisaris independen dan kepemilikan institusional tidak cukup bukti tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan, komite audit cukup bukti berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* dan ukuran perusahaan cukup bukti berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Kata kunci : Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, *Tax Avoidance*.



## ABSTRACT

Sheila Stevanny / 31199125 / 2023 / The effect of *Good corporate governance* Mechanisms and Company Size on *Tax avoidance* in Energy and Basic Materials Sector Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange in 2018 – 2021 / Supervisor : Rizka Indri Arfianti, S.E., Ak., M.M. , M.Ak.

The existence of taxes is one of the largest sources of income in Indonesia, so the government expects taxpayers to pay taxes according to actual conditions. Whereas for companies, tax is a burden that can reduce company profits so that companies will maximize their efforts to suppress tax payments without violating applicable regulations, namely tax management by carrying out *tax avoidance*. Company demands in implementing *tax avoidance* must be under proper supervision to form a *Good corporate governance* mechanism. The research aims to determine the mechanism of *good corporate governance* and company size on *tax avoidance*.

This research is based on agency theory. Agency theory explains that there are differences in interests and egoism in humans so that there are differences in interests between agents and agents *principal*. This situation creates an information imbalance known as information asymmetry.

The sample data used in this study are energy and basic materials sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2018 – 2021. Sample data collection was carried out by *purposive sampling method* and obtained as many as 40 samples. In this study, the sample data used will be tested through testing the similarity of the coefficients to find out whether data pooling can be done, descriptive statistical analysis, classical assumption test, multiple linear regression analysis, and hypothesis testing.

The results of the research based on the t test, obtained the significance results on the independent board of commissioners and institutional ownership of 0.336 and 0.222 respectively so that H1 and H2 rejected. However, the results of the significance of the audit committee and company size are respectively 0.008 and 0.032 so that H3 and H4 can be accepted. Meanwhile, through the f test, the results obtained simultaneously, independent board of commissioners, institutional ownership, audit committee and company size have an effect on *tax avoidance*.

In this study it can be concluded that the independent board of commissioners and institutional ownership have no significant effect on *tax avoidance*. Meanwhile, the audit committee has sufficient evidence of a negative effect on *tax avoidance* and firm size has sufficient evidence of a positive effect on *tax avoidance*.

**Keywords:** Independent Board of Commissioners, Institutional Ownership, Audit Committee, Company Size, *Tax avoidance*.



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada tuhan atas berkat dan penyertaan-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan karya akhir yang berjudul “Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax avoidance* Pada Perusahaan Sektor Energy dan Basic Materials Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2018 – 2021”. Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi syarat akhir dalam memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie.

Dalam proses penyusunan skripsi, penulis menyadari bahwa penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik karena telah dibimbing dan diberikan semangat oleh berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Orang tua tercinta yaitu Mami Novi Theresia, Nenek, Bopi, Ceri, Oscar dan seluruh keluarga penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selalu memberikan doa, motivasi, memperhatikan kesehatan penulis dan kasih sayang untuk menyelesaikan karya akhir.
2. Ibu Rizka Indri Arfianti, S.E., Ak., M.M., M.Ak., selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberikan kritik dan saran yang membangun untuk penulis, meluangkan waktunya untuk penulis serta membantu penulis dalam penyelesaian karya akhir hingga selesai. Terima kasih atas kesabaran, motivasi, dan bimbingan dari Ibu Rizka.
3. Seluruh dosen dan pengurus Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie yang memberikan bekal ilmu pengetahuan bagi peneliti selama proses perkuliahan.
4. Seluruh sahabat, rekan kerja dan teman penulis, Jonatan Glensius yang tidak hentinya untuk mendengarkan dan memberikan *support*, Regine Brigitta, Eddo dan Uria yang senantiasa memberikan dukungan secara emosional dan membantu penulis, Ci Fifi yang memberikan dukungan serta pengertian untuk penulis, Mba Elyana yang dengan tulus selalu mendukung dan mengingatkan penulis untuk menyelesaikan tepat waktu, kemudian Jeje, Tina Marselina, Miftahul Aulia, dan Elfina yang senantiasa memberikan bantuan serta motivasi.
5. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah banyak membantu penulis dengan berbagai bantuan dan dukungan selama ini.

Penulis menyadari bahwa karya akhir masih banyak terdapat kekurangan, Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi penyempurnaan karya ilmiah ini. Akhir kata, penulis berharap karya akhir ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta mendapatkan saran maupun kritik yang membangun.

Jakarta, 15 Maret 2023

Sheila Stevanny



## DAFTAR ISI

PENGESAHAN .....	i
ABSTRAK .....	ii
ABSTRACT .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR GAMBAR .....	vii
DAFTAR TABEL .....	viii
DAFTAR LAMPIRAN .....	ix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	8
C. Batasan Masalah .....	9
D. Batasan Penelitian .....	9
E. Rumusan Masalah .....	9
F. Tujuan Penelitian .....	10
G. Manfaat Penelitian .....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	12
A. Landasan Teori .....	12
1. Teori keagenan .....	12
2. Perpajakan .....	14
3. <i>Tax avoidance</i> .....	17
4. Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i> .....	19
5. Ukuran Perusahaan .....	23
B. Penelitian Terdahulu .....	24
C. Kerangka Pemikiran .....	28
1. Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap <i>Tax avoidance</i> .....	28
2. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap <i>Tax avoidance</i> .....	29
3. Pengaruh Komite Audit Terhadap <i>Tax avoidance</i> .....	30
4. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Tax avoidance</i> .....	31
D. Hipotesis .....	33



BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....	34
A. Obyek Penelitian .....	34
B. Desain Penelitian .....	34
C. Variabel Penelitian .....	36
D. Teknik Pengumpulan Data .....	40
E. Teknik Pengambilan Sampel .....	41
F. Teknik Analisis Data .....	43
1. Uji Kesamaan Koefisien Regresi / Pooling .....	43
2. Statistik Deskriptif .....	43
3. Uji Asumsi Klasik .....	44
4. Analisis Regresi Linear Ganda .....	47
5. Pengujian Hipotesis .....	48
BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN .....	52
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	52
B. Hasil Penelitian .....	53
1. Uji Pooling Data .....	53
2. Analisis Deskriptif .....	54
3. Uji Asumsi Klasik .....	56
4. Analisis Regresi Liner Berganda .....	59
5. Uji Hipotesis Penelitian .....	60
C. Pembahasan .....	62
1. Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap <i>Tax avoidance</i> .....	62
2. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap <i>Tax avoidance</i> .....	63
3. Pengaruh Komite Audit Terhadap <i>Tax avoidance</i> .....	64
4. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Tax avoidance</i> .....	65
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....	66
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran .....	66
DAFTAR PUSTAKA .....	68
LAMPIRAN .....	71

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



# DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran..... 33

**Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



# DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1	.....	40
Tabel 3. 2	.....	42
Tabel 4. 1	.....	53
Tabel 4. 2	.....	54
Tabel 4. 3	.....	56
Tabel 4. 4	.....	57
Tabel 4. 5	.....	58
Tabel 4. 6	.....	59
Tabel 4. 7	.....	59
Tabel 4. 8	.....	60

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian**



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang menyalin atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

# DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 .....	71
Lampiran 2 .....	72
Lampiran 3 .....	73
Lampiran 4 .....	74
Lampiran 5 .....	75
Lampiran 6 .....	76
Lampiran 7 .....	77
Lampiran 8 .....	77
Lampiran 9 .....	78
Lampiran 10 .....	78
Lampiran 11 .....	79
Lampiran 12 .....	79
Lampiran 13 .....	80
Lampiran 14 .....	80



- a. Penulisan karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Penulisan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Penulisan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Copyright © 2019 Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie. All rights reserved.

## BAB I

### PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan beberapa hal diantaranya adalah latar belakang akan menjelaskan mengenai beberapa informasi yang telah disusun secara sistematis yang akan mendasari penulisan, kemudian identifikasi masalah yang akan membahas mengenai masalah – masalah yang timbul berdasarkan latar belakang masalah, batasan masalah dengan tujuan lebih fokus dalam membahas masing-masing variable.

Mengingat adanya keterbatasan waktu dan tenaga penulis maka akan ditetapkan batasan terhadap penelitian, dilanjutkan dengan rumusan masalah untuk memperjelas masalah yang ingin diteliti, selain itu terdapat tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian dan diakhiri dengan pembahasan mengenai manfaat dalam penelitian bagi beberapa pihak terkait.

#### A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, pendapatan yang diperoleh dari sektor pajak sendiri memiliki presentase yang tertinggi, dengan presentase rata-rata sebesar tujuh puluh persen jika dibandingkan dengan sumber pendapatan lainnya. Sehingga tidak dapat dipungkiri penerimaan negara dalam sektor pajak memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian negara dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional, serta membiayai kegiatan pemerintah maupun digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak merupakan salah satu kontribusi yang wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan dan memiliki sifat memaksa didasarkan oleh Undang-Undang, kewajiban tersebut tidak mendapatkan imbalan secara

1. Dilarang menyalin atau seluruhnya atau sebagian tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengertian tersebut dapat diartikan bahwa pembayaran pajak bersifat memaksa baik oleh wajib

pajak orang pribadi maupun badan usaha, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung.

Melihat peranan pajak yang menjadi andalan bagi perekonomian negara, target penerimaan

pajak setiap tahun diharapkan akan terus meningkat.

Tanggapan wajib pajak terutama wajib pajak badan tidak selalu baik dalam hal

pemungutan pajak karena sifat pajak yang tidak memberikan imbalan secara langsung kepada

wajib pajak. Prespektif perusahaan, pajak menjadi perhatian penting karena dianggap menjadi

beban/biaya yang akan mengurangi laba bersih, sehingga hal ini bertolak belakang dengan

tujuan perusahaan. Terdapat banyak fenomena wajib pajak melakukan efisiensi beban pajak

dengan tujuan untuk mendapatkan laba yang maksimum. Salah satu cara untuk meminimalkan

pembayaran pajak adalah dengan melakukan strategi manajemen pajak. Meminimalisasikan

pembayaran pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih dalam lingkup

peraturan perpajakan hingga melanggar peraturan perpajakan, yang biasa dikenal dengan *Tax*

*avoidance dan Tax Evasion*. Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) merupakan upaya dalam

meminimalisasikan pembayaran pajak yang dilakukan dengan melanggar ketentuan

perpajakan, sanksi pidana menjadi ancaman bagi perusahaan apabila melakukan *tax evasion*.

Sebaliknya *tax avoidance* dilakukan dengan memanfaatkan celah (*loopholes*) yang

diperkenankan dalam peraturan perpajakan, tindakan tersebut dianggap legal dikarenakan

tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan.

Fenomena penghindaran pajak yang terjadi di dunia, dilakukan oleh salah satu perusahaan

asal Swedia yang bergerak di industry ritel perabot dan furnitur rumah tangga yaitu IKEA.

IKEA diduga melakukan penghindaran pajak dalam empat tahun ke belakang dengan nilai

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



mencapai 1 miliar euro atau setara dengan 1,1 miliar dollar AS dalam kurun waktu 2009 hingga 2014. IKEA dituduh secara sadar oleh media Independent tersebut akibat adanya pergeseran laba, atau IKEA dianggap dengan sengaja memindahkan dana miliaran euro labanya dari negara-negara yang memiliki tarif pajak tinggi seperti Inggris, Prancis dan Jerman ke anak perusahaannya yang tidak dikonfirmasi negara-negara terkait dengan tarif pajak yang rendah. Diketahui IKEA membentuk dua entitas bisnis yang terpisah di Belanda, Luksemburg dan Liechtenstein. Dalam laporan tersebut juga disebutkan bagaimana IKEA membebaskan biaya royalti dari satu perusahaan ke perusahaan lain dalam lingkup kepemilikan yang sama dengan tujuan meminimalisir pajak dan estimasi pajak yang dihindari oleh IKEA yang menyebabkan hilangnya pendapatan pajak di Jerman senilai 35 juta euro setara dengan 39 juta dollar AS, di Prancis 24 juta euro setara dengan 26 juta dollar AS dan 11,6 miliar euro atau 13 juta dollar AS di Inggris. (Kompas.com,2016).

Salah satu kasus *tax avoidance* yang terjadi di Indonesia, diduga dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk. Dugaan tersebut dilaporkan oleh lembaga *Global Witness*, mengungkapkan bahwa perusahaan PT Adaro Energy Tbk dalam periode 2009 sampai 2017. Pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak mendalami dugaan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan batu bara PT Adaro Energy Tbk dengan skema *transfer pricing* melalui anak perusahaan yang berada di Singapura. Coaltrade Service International anak perusahaannya di Singapura telah mengatur sedemikian rupa, diketahui dengan menjual batu bara ke Coaltrade Service dengan harga jual yang lebih murah kemudian batu bara tersebut di jual ke negara lain dengan harga yang lebih tinggi sehingga pendapatan kena pajak di Indonesia menjadi lebih murah. Dengan cara tersebut Adaro berhasil meminimalkan pembayaran pajak hingga 125 juta

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.  
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.

Hak cipta dilindungi undang-undang  
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



dollar atau setara Rp 1,75 triliun (kurs Rp 14.000) lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. (Sugianto, 2019).

*Tax avoidance* merupakan tindakan penghindaran pajak yang bersifat legal karena tidak melanggar perundang-undangan perpajakan, dengan memanfaatkan titik lemah atau hal-hal yang tidak diatur dalam undang-undang (Ngadiman & Puspitasari, 2017). *Tax avoidance* sebagai penghematan pembayaran pajak tidak dilarang tetapi seringkali mendapat pandangan kurang baik dari Direktorat Jendral Pajak karena dianggap memiliki konotasi negative. Penghindaran pajak dihitung menggunakan ETR (*Effective Tax Rate*) yaitu beban pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Dapat dikatakan *tax avoidance* adalah persoalan yang rumit dan unik oleh karena itu dalam pelaksanaan *tax avoidance* sebaiknya dibawah pengawasan. Terdapat beberapa faktor yang diduga mempengaruhi dalam mengambil tindakan *tax avoidance*, yaitu *good corporate governance* dan ukuran perusahaan.

Mekanisme *Good corporate governance* yang baik akan mempermudah perusahaan dalam memaksimalkan laba. Keberadaan mekanisme *good corporate governance* merupakan wujud penerimaan akan pentingnya suatu perangkat peraturan atau tata kelola yang baik untuk mengatur hubungan, fungsi dan kepentingan berbagai pihak dalam urusan bisnis (Tandean, 2017). *Good corporate governance* memiliki dasar tujuan untuk memberikan pengawasan terhadap kinerja pengelolaan perusahaan dan telah mengatur penerapan-penerapan yang harus dilakukan perusahaan agar dapat terus berkembang namun tidak bertentangan dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, khususnya peraturan perpajakan. Dalam hal ini *good corporate governance* berperan sebagai mekanisme membantu memastikan agar tata kelola perusahaan dalam memenuhi kewajiban pepajakan tetap berjalan dibawah hukum yang berlaku dan dalam koridor penghindaran pajak yang bersifat legal. Mekanisme *good corporate*



*governance* dibagi menjadi dua golongan, yaitu mekanisme eksternal dan internal dalam perusahaan. Menurut Fadhilah (2014) dalam Praditasari & Setiawan (2017), mekanisme internal merupakan usaha perusahaan dalam mengendalikan perusahaan dengan proses dan struktur internal di antaranya yaitu, proporsi dewan komisaris, komposisi dewan direksi, rapat umum pemegang saham, pertemuan dengan *board of director*, dan proporsi dewan komisaris independen. Mekanisme secara eksternal merupakan usaha pengawasan oleh perusahaan, pengendalian pasar, dan struktur kepemilikan. Dalam pelaksanaannya, GCG menjadi lebih efektif karena di bawah pengaruh oleh keberadaan organ perusahaan antara lain, rapat umum pemegang saham (RUPS), direksi dan dewan komisaris. RUPS sebagai organ perusahaan memberikan kontribusi terhadap *shareholders*, sedangkan dewan komisaris merupakan organ perusahaan yang bertanggung jawab untuk mengontrol serta memberikan nasihat kepada direksi. Dalam memenuhi tanggung jawabnya dewan komisaris dapat dibantu oleh beberapa komite, salah satunya komite audit.

*Good corporate governance* yang di berlakukan dengan baik semestinya sejalan dengan definisi pajak adalah sebagai kewajiban. Penerapan mekanisme *good corporate governance* dalam penelitian ini melalui beberapa proksi mekanisme internal seperti dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, dan komite audit. Sedangkan melalui mekanisme eksternal yaitu struktur kepemilikan saham merupakan kepemilikan institusional perusahaan,

Komisaris independen merupakan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dan tidak memegang jabatan dalam perusahaan. Menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan keberadaan komisaris independen jumlahnya wajib paling kurang tiga puluh persen dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris perusahaan. Bertanggung jawab untuk mendukung efektivitas perusahaan dan membantu untuk mengawasi secara keseluruhan jalannya operasional





perusahaan. Keberadaan komisaris independen diharapkan berdampak positif terhadap kinerja perusahaan. Adanya tanggung jawab antar komisaris independen dengan pemegang saham berdampak terhadap fokus komisaris independen untuk memaksimalkan laba sehingga kemungkinan terjadi *tax avoidance* semakin meningkat. Pernyataan tersebut didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Praditasari & Setiawan (2017) yang menunjukkan hasil komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* dan Mulyani et al. (2018) sependapat dengan hasil penelitian komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan menurut Arinta (2018) penelitiannya menunjukan hasil komisaris independen berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Proksi komite audit yang mempunyai tujuan utama pembentukannya adalah membantu tugas dan tanggung jawab dewan komisaris. Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan anggota komite audit minimal terdiri dari 3 anggota. Komite audit bertanggung jawab dalam bidang *good corporate governance* untuk memastikan perusahaan sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam hal ini yaitu memastikan perusahaan sudah berjalan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan membantu memberikan pendapat, nasihat kepada dewan komisaris. Jumlah komite audit yang tinggi mempengaruhi tingkat pengendalian laporan keuangan sehingga sulit untuk melaksanakan *tax avoidance*. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian Tandean (2017) yang memberikan hasil bahwa komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance* sedangkan menurut Hidayat (2020) menunjukkan hasil komite audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*, hasil penelitian Oktavia et al. (2020) sependapat bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



Hidayat (2020) mendefinisikan kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang kepemilikannya dimiliki institusi lain seperti bank, asuransi. Menurut Sandy & Lukviarman (2015) kepemilikan institusional mempunyai beberapa kelebihan seperti memiliki profesionalisme untuk menganalisa dan menguji keandalan informasi kemudian mempunyai motivasi yang lebih kuat dalam melaksanakan pengawasan yang lebih ketat terhadap operasional internal perusahaan. Kepemilikan institusional perusahaan karena memiliki pengaruh yang penting bagi perusahaan dalam memonitor operasional perusahaan seperti aktivitas manajemen perpajakan, mendorong tingkat pengawasan yang lebih optimal sehingga mempengaruhi tindakan *tax avoidance*. Harapan dari pihak institusional untuk perusahaan memaksimalkan laba nanti nya akan mempengaruhi perusahaan dalam melaksanakan *tax avoidance*. Pernyataan tersebut didukung oleh Ngadiman & Puspitasari (2017) yang menunjukkan hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* dan hasil penelitian Marlinda et al. (2020) menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* sedangkan menurut Tandean (2017) kepemilikan institusional tidak berpengaruh dalam mengurangi tindakan *tax avoidance*.

Salah satu faktor penentu untuk melakukan *tax avoidance* adalah karakteristik perusahaan. Karakteristik perusahaan dapat dikatakan sebagai ciri khas atau sifat yang melekat pada suatu usaha yang dapat dilihat dari beberapa sudut, salah satunya adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan digunakan sebagai skala penentu besar kecilnya sebuah perusahaan dapat didasarkan pada total nilai aset, total penjualan, kapitalisasi pasar, jumlah tenaga kerja dan sebagainya. Berdasarkan penelitan yang dilakukan oleh Kurniasih & Sari (2013) dalam Koming & Praditasari (2017) Semakin besar ukuran suatu perusahaan maka semakin menjadi pusat perhatian dari pemerintah sehingga akan menimbulkan kecenderungan bagi para manajer





### C. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini dibuat dengan tujuan lebih fokus dalam membahas masing-masing variabel, serta tidak menyimpang dari arah dan sasaran penelitian. Penulis membatasi masalah pada :

1. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

### D. Batasan Penelitian

Batasan penelitian digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan penelitian dan memudahkan dalam pembahasan. Mengingat adanya keterbatasan penelitian berupa waktu, dan tenaga maka adanya pembatasan penelitian sebagai berikut :

1. Objek penelitian

Penelitian dilakukan terhadap perusahaan sektor energy dan *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)

2. Waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan pada periode 2018-2021 sebagai tahun pengamatan.

### E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan batasan penelitian yang telah dibuat, maka peneliti merumuskan masalah yang akan dibahas, yaitu : “Apakah dewan komisaris independen,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian GIE



kepemilikan institusional, komite audit dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energy dan *basic materials*?”

## F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.

## G. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini akan bermanfaat bagi :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai akuntansi dan pajak dan mampu menunjukkan bukti empiris tentang pengaruh pengaruh dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*

- b. Bagi perusahaan



- Penelitian ini diharapkan memberikan informasi bagi perusahaan yang dijadikan sample dalam penelitian ini apakah dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sehingga perusahaan bisa membuat kebijakan mengenai sikap perusahaan terhadap kewajiban perpajakan.
- c. Bagi investor  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan investor.
- d. Bagi Direktorat Jendral Pajak  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan evaluasi dan masukan mengenai pentingnya *good corporate governance* dan ukuran perusahaan dalam perpajakan, sehingga Direktorat Jendral Pajak dapat memberikan sosialisasi dalam upaya membangun *good corporate governance* baik oleh wajib pajak orang pribadi atau pun wajib pajak badan.

**Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan mendeskripsikan tentang landasan teoritis, penelitian-penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis. Landasan teoritis membahas teori-teori yang menjadi dasar dan mendukung topik penelitian ini. Penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan pada penelitian ini akan dilampirkan sebagai bahan pertimbangan penelitian.

Kerangka pemikiran sebagai gambaran utama pola pikir hubungan dari masing-masing variable yang terkait satu sama lain. Kemudian dari kerangka pemikiran dapat ditarik hipotesis dari penelitian ini.

#### A. Landasan Teori

##### 1. Teori keagenan

Teori yang mendeskripsikan hubungan antara dua pelaku ekonomi, yaitu pihak *stakeholders* sebagai prinsipal yang mempekerjakan pihak manajer dikenal sebagai *agent*. Jensen & Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan agensi terlaksana ketika ada satu atau lebih prinsipal yang mempekerjakan pihak lain dengan tujuan pendelegasian wewenang untuk pengambilan keputusan kepada *agent* serta menjalankan aktivitas perusahaan atas nama pihak prinsipal sebaik mungkin. Menurut Tandean (2017) teori keagenan mengimplikasikan tentang adanya asimetri informasi diantara *agent* dan prinsipal. Asimetri informasi dapat diartikan sebagai kondisi dimana salah satu pihak dalam kegiatan ekonomi mengetahui lebih banyak informasi dibandingkan pihak lain. Manajer atau *agent* selaku pengelola dan pihak yang menjalankan aktivitas perusahaan lebih unggul mengetahui informasi internal menyebabkan kesenjangan akan cangkupan luasnya informasi yang diketahui oleh manajer dengan prinsipal.





Asimetri informasi dapat menyebabkan kondisi ketidakpastian informasi sehingga menimbulkan masalah keagenan, antara lain *adverse selection* dan *moral hazard*. *Adverse selection* merupakan kondisi dimana pihak prinsipal memiliki informasi lebih sedikit tentang kondisi dan prospek perusahaan, jika dibandingkan dengan pihak *agent*. *Moral hazard* terjadi dalam kegiatan ekonomi yang di laksanakan oleh agent dengan kondisi keputusan yang di ambil tidak diketahui sepenuhnya oleh pihak prinsipal, sehingga mengakibatkan agent bisa melakukan tindakan yang melanggar kontrak perjanjian perusahaan dan tidak menekan upaya dengan maksimal untuk kepentingan pemilik.

Berdasarkan penelitian Eisenhardt (1989) teori agensi disertai dengan 3 asumsi mengenai sifat dasar manusia yaitu, manusia umumnya mementingkan kepentingan diri sendiri (*self interest*), daya pikir manusia terbatas terhadap persepsi masa yang akan datang (*bounded rationality*), dan manusia sebisa mungkin untuk menghindari resiko (*risk averse*). Berdasarkan asumsi mengenai sifat dasar manusia maka dapat disimpulkan bahwa setiap manusia bertindak hanya untuk memenuhi kepentingan diri sendiri sehingga sebuah keputusan dalam kegiatan ekonomi tidak dapat memenuhi keinginan pihak *agent* maupun pihak prinsipal secara bersamaan.

Masalah keagenan yang timbul dalam perusahaan dapat mempengaruhi *tax avoidance* karena adanya perbedaan kepentingan dan tujuan kedua belah pihak. Perbedaan kepentingan antara manajer selaku *agent* yang pada dasarnya mempunyai kepentingan pribadi yang bersangkutan dengan peningkatan presentase laba yang tinggi sehingga peningkatan kompensasi menjadi lebih tinggi, sedangkan pihak *stakeholders* selaku prinsipal mempunyai tujuan menekan biaya pajak melalui presentase laba yang rendah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta dilindungi IBI IKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dalam tujuan untuk menjembatani masalah keagenan timbul praktik *tax avoidance* sehingga kepentingan kedua belah pihak dapat berjalan secara optimal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

## 2. Perpajakan

### a. Definisi Pajak

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun (2007) Pasal 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dilansir dari <https://www.pajak.go.id/id/pajak> menurut direktorat jendral pajak , pajak ialah kontribusi dari orang pribadi atau badan yang bersifat wajib dan memaksa didasari oleh Undang-Undang yang berlaku, tetapi tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara demi kemakmuran rakyat.

### b. Karakteristik Pajak

Pajak memiliki karakteristik yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun (2007) , yaitu :

- (1) Pajak adalah kontribusi wajib yang memiliki sifat memaksa,
- (2) Pajak dipungut didasari oleh Undang-Undang yang berlaku,
- (3) Pajak tidak memberikan timbal balik secara langsung.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



### c. Fungsi Pajak

Dalam lingkup ekonomi negara, dilansir melalui situs resmi Direktorat Jendral Pajak terdapat 2 fungsi pajak, antara lain :

#### (1) Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak berperan sebagai *budgetair*, artinya pajak merupakan sumber dari pendapatan negara yang bermanfaat untuk mengakomodasi pengeluaran dalam menjalankan tugas dan kebutuhan rutin negara serta pelaksanaan pembangunan untuk perkembangan negara. Seiring meningkatnya perkembangan negara yang menyebabkan kebutuhan semakin banyak pemerintah selalu mengupayakan peningkatan pendapatan pajak sehingga dapat menyesuaikan kebutuhan pembiayaan negara.

#### (2) Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak berperan sebagai pengatur, artinya pajak merupakan alat negara dalam mengatur kebijakan pemerintah dalam aspek sosial dan ekonomi, serta berperan untuk membantu negara menggapai tujuan tertentu di luar lingkup ekonomi.

#### (3) Fungsi Stabilitas

Keberadaan pajak bermanfaat bagi pemerintah sarana untuk melaksanakan kebijakan yang berkaitan langsung dengan stabilitas harga untuk menekan inflasi, di antara lain dapat dilakukan dengan mengatur peredaran uang di masyarakat, memungut pajak, dan menggunakan pajak secara efektif dan efisien

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



#### (4) Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pendapatan atas pajak yang sudah dipungut oleh negara akan dimanfaatkan untuk membiayai seluruh kepentingan umum, termasuk biaya pembangunan yang memberikan kesempatan kerja, sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat.

### C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

#### d. Jenis Pajak

Menurut Waluyo (2017:12), pajak memiliki beberapa jenis yang dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu :

#### (1) Pajak menurut golongan atau pembebanan , dikelompokkan menjadi 2, yaitu :

- (a) Pajak langsung, pembebanan pajak yang ditanggung atau dipikul sendiri oleh wajib pajak dengan arti lain tidak dapat ditanggung atau dibebankan kepada wajib pajak lain.
- (b) Pajak tidak langsung, pembebanan pajak yang dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain.

#### (2) Pajak menurut sifat, dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri prinsip, yaitu :

- (a) Pajak subjektif, pemungutan pajak yang memperhatikan kondisi subyek yang bersangkutan.
- (b) Pajak objektif, pengenaan pajak yang memperhatikan kondisi objek yang bersangkutan, tanpa memperhatikan kondisi subyek.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



(3) Pajak menurut pemungut dan pengelolanya, yaitu :

- (a) Pajak Negara atau pajak pusat, merupakan pajak yang dipungut oleh instansi pemerintah pusat dan digunakan untuk kepentingan biaya rumah tangga Negara secara umum.
- (b) Pajak Daerah, merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah setempat dan digunakan untuk kepentingan biaya rumah tangga daerah masing-masing.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**3 Tax avoidance**

**a. Definisi *Tax avoidance***

Penghindaran pajak atau *tax avoidance* menurut N.A.Barr, S.R. James, A.R. Prest dalam Zain (2008:50) diartikan memanipulasi penghasilan yang pelaksanaannya legal, serta masih sesuai ketentuan perundang-undangan pajak yang berlaku dengan tujuan meminimalisasi pembayaran pajak yang terutang. Menurut Robert H. Anderson dalam Zain (2008:50) *tax avoidance* merupakan cara pengurangan pajak yang masih dalam lingkup ketentuan peraturan undang-undang perpajakan, dan dapat dibenarkan, terutama melalui perencanaan pajak. Upaya untuk mengurangi penghasilan kena pajak dengan *tax avoidance* merupakan persoalan yang rumit dan unik, karena upaya ini tidak melanggar peraturan undang-undang yang berlaku tetapi disisi pemerintah upaya tersebut tidak diinginkan karena berdampak pengurangan pendapatan negara.

Dikutip dari (<https://news.ddtc.co.id>), pengertian *tax avoidance* menurut ahli yaitu Justice Reddy mengemukakan *tax avoidance* sebagai seni untuk menghindari pajak tanpa melanggar hukum, dan menurut James Kessler *tax avoidance* merupakan usaha-usaha yang dilakukan oleh wajib pajak sebagai upaya untuk meminimalkan pajak

- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
- 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dengan cara yang bertentangan dengan maksud dan tujuan dari pembuat undang-undang.

Undang.

b) Pengukuran *Tax avoidance*

*Tax avoidance* dapat diukur menggunakan metode *effective tax rate (ETR)*. ETR pada dasarnya merupakan presentase besar tarif pajak yang ditanggung oleh perusahaan, yaitu dengan membandingkan beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak. Semakin besar ETR mengindikasikan semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan. Hanlon & Heitzman (2010) menyatakan ada 3 jenis proksi yang umum diaplikasikan oleh perusahaan untuk melihat presentase nilai ETR perusahaan, yaitu :

(1) *Generally Accepted Accounting Principle Effective Tax Rate (GAAP ETR)*

GAAP ETR merupakan nilai atau *rate* yang mempengaruhi laba, digunakan untuk strategi pajak yang tidak dapat menanggukhan pajak, GAAP ETR tidak dapat mengukur dalam jangka waktu yang panjang dikarenakan GAAP ETR memiliki kekurangan, yaitu penggunaan beban pajak sebagai pembilang.

$$GAAP ETR = \frac{\text{total beban pajak penghasilan}}{\text{laba sebelum pajak}}$$

(2) *Cash ETR*

*Cash ETR* merupakan refleksi dari kemampuan perusahaan untuk membayar sejumlah kecil nilai *cash taxes* dari *pre-tax income* menurut Dyreng at al (2008)

$$CASH ETR = \frac{\text{cash tax paid}}{\text{pre - tax income}}$$

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



### (3) *Current ETR*

- Ⓒ Current ETR digunakan untuk mengukur total beban pajak dikurangi dengan pajak tangguhan *Ayers et al* (2009). Pengukuran bermanfaat untuk melihat nilai ETR perusahaan atas beban pajak saat ini.

$$\text{Current ETR} = \frac{\text{current tax expense}}{\text{pre - tax income}}$$

## 4 Mekanisme *Good Corporate Governance*

Istilah Corporate Governance diperkenalkan oleh *Cadbury Committee* dalam laporannya pada tahun 1992, yaitu “*The Financial Aspects of Corporate Governance*”.

Menurut Cadbury Committee (1992) *good corporate governance* merupakan prinsip yang memandu dan mengendalikan perusahaan untuk mencapai keselarasan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan dalam memberi tanggung jawab khususnya kepada para pemegang saham dan pemangku kepentingan umum. Berdasarkan Manossoh (2016) keberadaan corporate governance muncul karena adanya kepentingan perusahaan untuk memastikan dana yang ditanamkan oleh pihak penanam modal digunakan secara tepat dan efisien. Lebih jauh Shleifer & Vishny (1997) mengemukakan bahwa *good corporate governance* merupakan suatu mekanisme yang dapat digunakan untuk memastikan bahwa supplier keuangan atau pemilik modal perusahaan memperoleh pengembalian atau *return* dari kegiatan yang dijalankan oleh manajer atau dengan kata lain bagaimana supplier keuangan perusahaan melakukan pengendalian terhadap manajer

Prinsip-prinsip utama dari *good corporate governance* menurut Kementerian BUMN (2012) No. SK-16/S.MBU/2012 pada bab II pasal 3 adalah transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). KNKG (2006) berpendapat yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.





harus dipastikan oleh perusahaan adalah diterapkannya prinsip-prinsip *good corporate governance* diseluruh lingkup bisnis dan di seluruh jajaran internal perusahaan untuk mempermudah tercapainya kesinambungan usaha (*sustainability*) perusahaan serta menciptakan pasar yang adil, terbuka, efisien serta sesuai dengan perundang-undangan.

*Good corporate governance* yang berperan sebagai sistem, struktur, dan mekanisme dalam mendukung ketaatan manajemen terhadap pajak dianggap sangat penting, serta memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan perusahaan atas perpajakan usaha.

Dalam pelaksanaannya, *good corporate governance* memiliki mekanisme

a. Dewan komisaris independen

Definisi dewan komisaris menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan (2014) no. 33/POJK.04/2014 adalah organ emiten atau perusahaan yang memiliki tugas untuk melaksanakan pengawasan secara umum ataupun khusus berdasarkan anggaran dasar dan memberi nasihat kepada Direksi.

Dewan Komisaris Independen adalah anggota dari dewan komisaris yang asalnya berasal dari luar emiten atau perusahaan yang memenuhi persyaratan untuk menjadi komisaris independen sebagaimana yang diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (2014) no. 33/POJK.04/2014 yaitu, bukan merupakan individu yang bekerja atau memiliki tanggung jawab dalam memimpin, merencanakan, mengendalikan serta memantau kegiatan perusahaan, tidak memiliki saham baik secara langsung maupun tidak langsung pada perusahaan yang bersangkutan, tidak memiliki hubungan afiliasi dan hubungan kepentingan usaha dengan perusahaan dan jajaran anggota perusahaan baik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI IKK (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



secara langsung maupun tidak langsung. Otoritas Jasa Keuangan (2014) juga mengatur bahwa anggota komisaris independen wajib paling kurang 30% dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris.

Keberadaan komisaris independen bertujuan untuk membantu menciptakan iklim dan lingkungan kerja yang lebih obyektif, dapat menempatkan kewajaran (*fairness*) dan kesetaraan di antara berbagai kepentingan, termasuk kepentingan pemegang saham minoritas dan stakeholder lainnya. Sochib (2016) mengemukakan bahwa dewan komisaris merupakan jantung dari terlaksananya corporate governance yang ditugaskan untuk memastikan penerapan strategi perusahaan, mengendalikan manajemen dalam mengelola perusahaan, serta bertanggung jawab untuk memantau terlaksananya akuntabilitas.

b. Kepemilikan Institusional

Menurut Siregar et al. (2005) kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh lembaga keuangan seperti bank, dana pension, asuransi, dan *investment banking*. Damayanti & Susanto, (2016) keterikatan tanggung jawab perusahaan dengan pemegang saham, membuat pemilik institusional mempunyai hak untuk memastikan manajemen perusahaan membuat keputusan yang memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham.

Keberadaan kepemilikan insititusional memiliki dampak yang signifikan bagi perusahaan dalam pemantauan manajemen karena akan meningkatkan pengawasan secara optimal sehingga mempengaruhi praktik *tax avoidance*.

Kepemilikan Institusional diukur menggunakan,

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{jumlah saham institusional}}{\text{total sahan yang beredar}}$$

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



c. Komite Audit

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Agar semua prinsip-prinsip yang tercakup dalam *good corporate governance* dapat berjalan secara efektif, maka diperlukan sistem pengawasan dan pengendalian yang memadai dalam pengelolaan sebuah perusahaan.

Sulisiyanto (2008:141) untuk membangun sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif dalam suatu perusahaan ada dua pihak yang diperlukan yaitu komite audit dan komisaris independen. Komite audit merupakan pihak yang mempunyai tugas untuk membantu komisaris dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan dan peningkatan efektifitas internal dan eksternal audit. Dalam pelaksanaan tugasnya, komite audit menurut Sulisiyanto (2008:141) melakukan pengawasan untuk meningkatkan efektifitas dalam menciptakan keterbukaan laporan keuangan yang berkualitas, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pengawasan internal yang harus memadai. Komite audit berfungsi sebagai jembatan jaringan komunikasi antara auditor internal dan eksternal dan dewan direksi, dan kegiatan mereka memperhitungkan review auditor dinominasikan, keseluruhan ruang lingkup audit, hasil audit, kontrol keuangan internal dan informasi keuangan untuk publikasi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit menyebutkan bahwa komite audit harus beranggotakan paling sedikit terdiri dari 3 anggota yang asalnya dari luar emiten atau perusahaan dan komite audit harus mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam tiga bulan dalam tiga bulan. Hal tersebut membantu agar komunikasi yang baik tetap terjaga Komite audit perusahaan yang membuat kesalahan dalam pelaporan keuangan memiliki jumlah angka pertemuan lebih sedikit daripada komite audit perusahaan yang tidak membuat kesalahan dalam pelaporan keuangan Beasley et al. (2004) dalam Pamudji & Trihartati (2010). Komite Audit dapat diukur menggunakan,

$$\text{Komite Audit} = \text{jumlah anggota komite audit}$$

##### 5. Ukuran Perusahaan

Berdasarkan penelitian Suwito & Herawaty (2005) ukuran perusahaan merupakan skala dimana dapat dikategorikan besar kecil perusahaan, yang dapat dilihat dari total aktiva, log size, nilai pasar saham, dan lain-lain, sehingga ukuran perusahaan merupakan nilai yang menentukan besar kecilnya perusahaan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 perusahaan dapat dikriteriakan dalam empat jenis antara lain usaha mikro merupakan usaha milik perorangan yang memiliki kekayaan paling banyak Rp 50.000.000 dengan total penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000. Usaha kecil merupakan usaha ekonomi yang produktif umumnya dimiliki oleh orang pribadi atau badan usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih minimal Rp 50.000.000 dan maksimal Rp 500.000.000 dengan jumlah penjualan tahunan mulai dari Rp 300.000.000.000 sampai Rp

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2.500.000.000. Usaha menengah adalah usaha yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang pribadi ataupun badan usaha, umumnya memiliki kekayaan bersih minimal Rp 500.000.000 hingga Rp 2.500.000.000 dengan hasil penjualan tahunan sekitar Rp 2.500.000.000 dan paling banyak Rp 50.000.000.000

Teori keagenan oleh Jensen & Meckling (1989) menyatakan bahwa perusahaan dengan ukuran besar mempunyai biaya keagenan yang lebih besar jika dibandingkan dengan perusahaan kecil. Penelitian Putri & Putra (2017) menyatakan bahwa semakin besar ukuran suatu perusahaan akan berpengaruh terhadap peningkatan laba yang besar dan menyebabkan kompleksnya setiap transaksi yang terjadi, hal ini berpengaruh dengan pembayaran pajak yang akan semakin meningkat sehingga tidak dipungkiri jika perusahaan akan semakin fokus untuk melaksanakan praktik *tax avoidance*. Pengukuran besar kecil suatu perusahaan dapat dilihat melalui jumlah aktiva atau aset yang dimiliki, total penjualan perusahaan pada periode tertentu, total hutang pada periode tertentu, total aktiva perusahaan.

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan usaha yang dilakukan penelitian untuk mendapatkan perbandingan kemudian digunakan sebagai ide baru untuk membuat penelitian selanjutnya. Topik mengenai *tax avoidance* sudah familiar diteliti. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang terikat dengan topik *tax avoidance*.

Penelitian dilakukan oleh Vivi Adeyani Tandean pada tahun 2017 berjudul pengaruh *good corporate governance* dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010 sampai dengan 2013.



Penelitian menggunakan analisis regresi berganda dan berdasarkan hasil dari penelitian menyatakan bahwa kepemilikan institusional, independensi auditor dan ukuran perusahaan tidak cukup bukti berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan komite audit secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*

Penelitian dilakukan oleh Ni Koming Ayu Praditasari, Putu Ery Setiawan pada tahun 2017 berjudul pengaruh *good corporate governance*, ukuran perusahaan, leverage dan profitabilitas pada *tax avoidance* pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar di BEI periode 2011 sampai dengan 2015. Penelitian menggunakan analisis regresi linear berganda dan berdasarkan hasil dari penelitian menyatakan bahwa kepemilikan institusional, komite audit, dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif pada *tax avoidance* serta leverage dan profitabilitas berpengaruh positif pada *tax avoidance*. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh pada *tax avoidance*.

Penelitian dilakukan oleh Sri Mulyani, Anita Wijayanti, Endang Masitoh pada tahun 2018 berjudul pengaruh corporate governance terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan periode 2014 sampai dengan 2016. Penelitian menggunakan analisis regresi linear berganda dan berdasarkan hasil dari penelitian menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, komisaris independen berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance*, komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, kualitas audit tidak berpengaruh positif namun signifikan terhadap *tax avoidance*

Penelitian dilakukan oleh Ngadiman dan Christiany Puspitasari pada tahun 2018 berjudul pengaruh leverage, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan terhadap



penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia 2010 sampai dengan 2012. Penelitian menggunakan analisis regresi linear berganda dan berdasarkan hasil dari penelitian menyatakan bahwa variabel leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan variabel kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Penelitian dilakukan oleh Edeline dan Amelia Sandra pada tahun 2018 berjudul pengaruh ukuran perusahaan, metode akuntansi, dan struktur kepemilikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2010 sampai dengan 2013. Penelitian menggunakan analisis regresi berganda dan berdasarkan hasil dari penelitian menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak, metode akuntansi berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dan struktur kepemilikan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian dilakukan oleh Aliftia Zulfika Putri, Muhammad Rafki Nazar, dan Kurnia pada tahun 2018 berjudul pengaruh corporate governance dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* studi empiris pada perusahaan yang terdaftar di indeks sri kehati periode 2013 – 2015. Penelitian menggunakan analisis regresi berganda dan berdasarkan hasil dari penelitian menyatakan bahwa kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, komite audit, kualitas audit dan ukuran perusahaan berpengaruh secara bersama-sama terhadap *tax avoidance*. Secara parsial, proporsi dewan komisaris independen dan komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan kepemilikan institusional, kualitas audit, dan ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.





Penelitian dilakukan oleh Asthari Oliviana dan Dul Muid pada tahun 2019 berjudul pengaruh *good corporate governance* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2014 sampai dengan 2017. Penelitian menggunakan analisis regresi berganda dan berdasarkan hasil dari penelitian menyatakan bahwa karakter eksekutif, dewan direksi, dan komite audit memiliki pengaruh yang signifikan negatif terhadap *tax avoidance*. Ukuran perusahaan dan komisaris independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan rapat komite audit dan kualitas audit memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap *tax avoidance*.

Penelitian dilakukan oleh Dian Eva Marlinda, Kartika Hendra Titisari, dan Endang Masitoh pada tahun 2020 berjudul pengaruh *good corporate governance*, profitabilitas, capital intensity, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2016 sampai dengan 2018. Penelitian menggunakan analisis regresi linear berganda dan berdasarkan hasil dari penelitian menyatakan bahwa dewan komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*., kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*, komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*, profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian dilakukan oleh Vivi Oktavia , Ulfi Jefri , Jaka Wijaya Kusuma pada tahun 2020 berjudul pengaruh *good corporate governance* dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI Periode 2015 sampai dengan 2018. Hasil penelitian menyatakan bahwa variable komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, variabel komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



terhadap *tax avoidance* dan variabel komisaris independen, komite audit dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance*.

Penelitian dilakukan oleh Fila Azizah Ismail dan Diamonalisa Sofiyanti pada tahun 2021 berjudul *good corporate governance* dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di BEI periode 2017 sampai dengan 2019. Penelitian menggunakan analisis regresi berganda dan berdasarkan hasil dari penelitian menyatakan bahwa *good corporate governance* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance* dan ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*.

### C. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh dari 4 variabel independen yaitu komisaris independen ( $X_1$ ), kepemilikan institusional ( $X_2$ ), komite audit ( $X_3$ ), dan ukuran perusahaan ( $X_4$ ) dengan variabel dependen yaitu *tax avoidance* ( $Y$ ).

#### 1. Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap *Tax avoidance*

Secara garis besar menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan (2014) no. 33/POJK.04/2014 komisaris independen merupakan komisaris yang tidak bekerja ataupun mempunyai wewenang dalam aktivitas emiten atau perusahaan. Komisaris independen memiliki tanggung jawab untuk monitoring secara umum maupun khusus pelaksanaan aktivitas perusahaan seperti mengawasi keputusan manajemen perihal kebijakan yang akan diputuskan tetap berada di jalur yang seharusnya dan tidak melanggar hukum termasuk mengenai kebijakan yang berkaitan dengan pajak. Selain itu, komisaris independent memiliki wewenang untuk memberikan pengarahan, petunjuk, pendapat kepada direksi. Keberadaan komisaris independen dalam



membantu efektivitas perusahaan memiliki dampak positif pada kinerja perusahaan sehingga pengarahan yang diberikan oleh komisaris independen dapat mengurangi kemungkinan asimetri informasi yang sering terjadi antara prinsipal dan agen.

Komisaris independen memiliki komitmen dengan pemegang saham untuk menyeimbangkan kepentingan perusahaan dengan pemegang saham. Hal tersebut membuat komisaris independen memperjuangkan ketaatan pajak, sehingga semakin tinggi jumlah komisaris independen dalam perusahaan dapat membantu mengurangi praktik *tax avoidance* karena semakin tinggi jumlah komisaris independen semakin tinggi juga pengawasan aktivitas emiten atau perusahaan yang berkaitan langsung dengan perilaku oportunistik.

Argumentasi tersebut didukung dengan hasil penelitian Mulyani et al., (2018) dan Praditasari & Setiawan (2017) yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance*.

## 2. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax avoidance*

Keberadaan kepemilikan institusional memiliki kedudukan penting dalam hal ketika perusahaan harus memutuskan kebijakan, serta berperan untuk mengawasi jalannya operasional perusahaan. Tanggung jawab manajemen perusahaan selain untuk memenuhi kepentingan dan tujuan perusahaan juga harus menyeimbangkan dengan memenuhi kepentingan pihak institusional.

Sandy & Lukviarman (2015) mengungkapkan jika tingkat kepemilikan saham perusahaan lebih besar dimiliki oleh institusi perusahaan lain ataupun pemerintah, memberikan dampak pada pengawasan pihak institusional terhadap kinerja manajemen perusahaan yang didasari dengan tujuan agar memperoleh keuntungan sesuai dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



yang diharapkan. Sehingga hal tersebut mendorong manajemen perusahaan berusaha untuk menekan pembayaran pajak seminimal mungkin, karena pajak dipandang mengurangi laba bersih.

Salah satu strategi yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan yaitu melakukan praktik *tax avoidance* yang akan membantu untuk penghematan pajak, Amri (2017). Penghematan pembayaran pajak akan berdampak terhadap peningkatan laba bersih perusahaan sehingga membantu pihak manajemen dalam memenuhi harapan pihak institusional. Jika dikaitkan dengan peran penting pihak institusional dalam pengawasan kegiatan operasional perusahaan seharusnya dapat membuat manajemen perusahaan untuk tidak melakukan praktik *tax avoidance*. Namun dikarenakan adanya tekanan untuk memenuhi harapan pihak institusional, berdampak bagi pihak manajemen untuk melakukan tindakan *tax avoidance* untuk meningkatkan laba perusahaan. Sehingga kepemilikan institusional yang tinggi secara umum berdampak lebih agresif dalam meminimalkan beban pajak sehingga semakin tinggi pelaksanaan *tax avoidance*.

Argumentasi tersebut didukung dengan hasil penelitian Ngadiman & Puspitasari (2017) yang menyatakan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

### 3. Pengaruh Komite Audit Terhadap *Tax avoidance*

Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris dan dipimpin oleh komisaris independen. Keberadaan komite audit bertanggung jawab untuk membantu dewan komisaris melaksanakan tugas, sehingga komite audit dapat membantu dalam mekanisme monitoring pelaporan eksternal perusahaan. Keputusan Ketua Bapepam-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



LK Nomor: Kep-643/BL/2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja

**C** Komite Audit mengemukakan komite audit memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan penelaahan terhadap informasi keuangan yang dikeluarkan emiten atau perusahaan kepada publik, melakukan analisa terhadap ketaatan emiten terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, memberikan pendapat serta pandangan kepada dewan komisaris berkaitan dengan kebijakan keuangan, akuntansi dan pengendalian internal perusahaan.

Berdasarkan keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-643/BL/2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit minimal terdiri dari 3 orang anggota. Berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab komite audit untuk membantu perusahaan dalam mengawasi informasi laporan keuangan yang akan mempengaruhi laporan keuangan perusahaan karena komite audit akan memastikan laporan keuangan yang disajikan sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, sehingga laporan keuangan menjadi lebih transparan. Semakin banyak jumlah anggota komite audit akan memberikan dampak terhadap pengendalian dalam kebijakan laporan keuangan yang akan semakin ketat dan sulit untuk melakukan praktik *tax avoidance*. Oleh sebab itu, semakin tinggi jumlah komite audit suatu perusahaan maka semakin rendah tingkat perusahaan melakukan praktik *tax avoidance*.

Argumen tersebut didukung dengan hasil penelitian Wahyudi (2014) dan Tandean (2017) yang menyatakan komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

#### **4 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax avoidance***

Ukuran perusahaan dikategorikan menjadi dua yaitu perusahaan kecil dan perusahaan besar. Menurut Oliviana & Muid (2019) perusahaan dengan jumlah total

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



aset yang besar menunjukkan bahwa perusahaan telah mencapai tingkat kedewasaan bahwasanya perusahaan tersebut memiliki arus kas yang sudah positif dan perusahaan dianggap memiliki prospek jangka panjang yang baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan lebih stabil dan dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan dengan total asset yang lebih kecil.

Berdasarkan penelitian Tandean & Winnie (2018) dalam Marlinda et al. (2020) ukuran perusahaan yang besar memiliki kemungkinan lebih besar bagi perusahaan untuk dapat dikenal lebih baik oleh publik sehingga memudahkan untuk mendapatkan informasi mengenai perusahaan. Hal tersebut memungkinkan menjadi batasan dalam melakukan *tax avoidance* karena perusahaan menjadi sorotan dan sasaran dari keputusan regulator. Perusahaan dengan skala ukuran kecil kurang dapat mengoptimalkan pengelolaan pajak dikarenakan kurangnya ahli dalam bidang perpajakan. Jika dibandingkan dengan ukuran perusahaan yang lebih kecil, tentu saja perusahaan dengan ukuran besar lebih berpotensi memiliki sumber daya manusia yang ahli dalam bidang pengelolaan pajak perusahaan. Dengan keunggulan sumber daya manusia ahli yang dimiliki oleh perusahaan ukuran besar akan memiliki dampak terhadap upaya meningkatkan *tax avoidance* dalam mengelola beban pajak.

Argumen tersebut didukung dengan hasil penelitian Sandra & Edeline (2015) dan Marlinda et al. (2020) yang menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

**C** Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

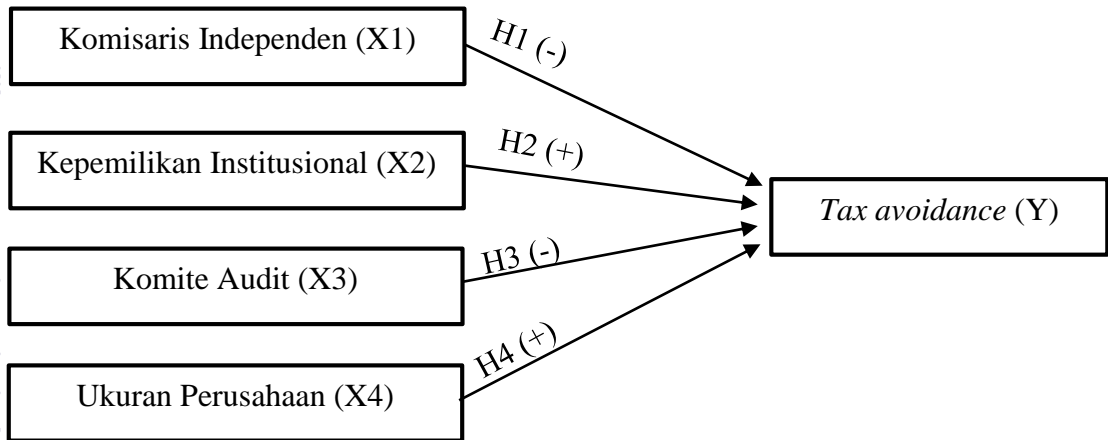
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Gambar 2. 1

Kerangka Pemikiran



D. Hipotesis

Berlandaskan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut :

- H<sub>1</sub> = Komisararis Independen berpengaruh negatif terhadap *Tax avoidance*
- H<sub>2</sub> = Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap *Tax avoidance*
- H<sub>3</sub> = Komite Audit berpengaruh negatif terhadap *Tax avoidance*
- H<sub>4</sub> = Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap *Tax avoidance*

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab tiga, peneliti akan menguraikan mengenai metode penelitian yang akan digunakan untuk melaksanakan penelitian. Mencakup gambaran obyek penelitian, desain penelitian, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengambilan sampel dan teknik analisis data dalam pengujian hipotesis.

Pada bab ini juga akan dipaparkan lebih lanjut terkait variabel yang diteliti serta proksi pengukuran variabel, kemudian sumber pengambilan data dan metode pengambilan sampel oleh penulis. Penelitian menggunakan analisis data dengan metode regresi liner ganda dengan harapan peneliti dapat memperoleh hasil yang signifikan terhadap variabel yang diuji.

#### A. Obyek Penelitian

Obyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang termasuk dalam sektor *energy* dan *basic materials* terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Peneliti melakukan pengamatan terhadap data sekunder berupa *annual report* dan *financial report* perusahaan sektor *energy* dan *basic materials* untuk periode 2018 -2021.

#### B. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian menurut Cooper & Schindler (2017:127) yang mengartikan sebagai struktur dan perencanaan dari investigasi yang disusun untuk mendapat hasil atas pertanyaan penelitian.

1. Dilarang menyalin atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipannya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.







## 1. Berdasarkan tingkat perumusan masalah

Penelitian diawali dengan hipotesis serta pertanyaan mengenai penelitian kemudian melibatkan prosedur dan spesifikasi sumber data yang tepat. Sehingga penelitian termasuk dalam kategori studi formal (*formalized study*).

## 2. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini termasuk ke dalam kategori studi pengamatan (*observational studies*). Data yang dibutuhkan untuk penelitian adalah data sekunder yang berupa data laporan tahunan yang diperoleh dengan mengunduh melalui situs [www.idnfinancials.com](http://www.idnfinancials.com) dan situs tersendiri dari perusahaan kemudian diolah untuk mendapatkan hasil penelitian.

## 3. Pengendalian Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti tidak dapat mengontrol dan tidak dapat memanipulasi variabel-variabel yang diteliti. Peneliti hanya dapat mengamati dan melaporkan apa yang telah terjadi atau apa yang sedang terjadi dalam data yang sudah ada, sehingga penelitian ini termasuk dalam desain penelitian sesuai fakta (*ex post facto*). Hal tersebut mengurangi kemungkinan manipulasi terhadap variabel penelitian sehingga akan meminimalisasikan kesalahan yang mungkin terjadi dalam penelitian ini.

## 4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari mekanisme *good corporate governance* dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. Dengan kaitan antara “pengaruh” variabel independen dengan “seberapa besar pengaruh” variabel dependen. Sehingga penelitian ini termasuk dalam studi kausal (*causal explanatory*).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



## 5. Berdasarkan dimensi waktu

Dimensi waktu penelitian merupakan kombinasi antara *time series* dan *cross-sectional*, karena penelitian ini mengambil data dari perusahaan dan selama periode kurun waktu tertentu saja, (*over an extended period of time*) yaitu tiga tahun (2018-2021).

## 6. Berdasarkan Ruang Lingkup Penelitian

Pada penelitian ini termasuk dalam studi statistik (*statistic studies*) sebab penelitian ini berusaha mengetahui ciri-ciri populasi dengan melakukan penarikan kesimpulan dari ciri-ciri sampel. Hipotesis dalam penelitian ini akan diuji secara kuantitatif dengan berbagai uji statistik.

## 7. Lingkungan Penelitian

Penelitian tergolong sebagai penelitian lapangan (*field study*) dikarenakan objek penelitian ini berada dalam lingkungan nyata yaitu perusahaan sektor *energy* dan *basic materials* yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2018-2021 dan bukan termasuk data simulasi.

## C. Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis variabel penelitian, yaitu variabel yang terikat (variabel dependen) dan variabel bebas (variabel independen) sebagai berikut :

### 1. Variabel Dependen

Dalam penelitian ini, *tax avoidance* berkedudukan sebagai variabel dependen. *Tax avoidance* merupakan suatu upaya wajib pajak untuk mengurangi atau menekan hutang pajak yang harus dibayarkan dengan memanfaatkan celah yang tidak termasuk dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



peraturan perundang-undangan, sehingga tindakan *tax avoidance* dapat dikatakan tidak melanggar undang-undang yang berlaku. Pengukuran variabel dependen yaitu *tax avoidance* dalam penelitian ini menggunakan rumus ETR (*Effective Tax Rate*). Penggunaan ETR sebagai pengukuran *tax avoidance* karena ETR dianggap dapat merfleksikan perbedaan tetap laba buku dengan laba fiskal, Sandy & Lukviarman (2015). Proksi nilai ETR dengan *tax avoidance* berkebalikan dengan indikasi *tax avoidance* sendiri, jika ETR semakin besar *tax avoidance* semakin kecil sementara jika ETR semakin kecil *tax avoidance* akan semakin besar. Oleh sebab itu data ETR dikalikan dengan -1 agar proksi dengan *tax avoidance* dapat sejalan. Jika tarif pajak yang seharusnya dibayarkan oleh wajib pajak badan adalah sebesar 22%, apabila hasil ETR berada dibawah maupun diatas 22% maka perusahaan diindikasikan melakukan *tax avoidance* karena pembayaran pajak yang tidak sesuai dengan tarif aturan yang berlaku. Hanlon & Heitzman (2010) memaparkan tarif ETR dapat dihitung dengan total dari beban pajak penghasilan dibagi dengan laba sebelum pajak, sebagai berikut :

$$ETR = \frac{\text{total beban pajak penghasilan}}{\text{laba sebelum pajak}}$$

## 2 Variabel Independen

Variabel independen atau bisa disebut sebagai variabel bebas, adalah variabel yang berkedudukan untuk mempengaruhi variabel dependen baik secara positif atau negative. Dalam penelitian ini, variabel independen yang digunakan sebagai berikut :

### A. Komisaris independen

Komisaris independen sebagai individu yang tidak terafiliasi dari perusahaan dengan tanggung jawab untuk mengawasi jalannya perusahaan untuk menjaga ketaatan pajak, sehingga akan berpengaruh terhadap *tax avoidance* . Proporsi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dewan komisaris independen dapat diukur dari jumlah anggota komisaris independent dibagi dengan jumlah anggota dewan komisaris, sebagai berikut :

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{jumlah komisaris independen}}{\text{jumlah anggota dewan komisaris}}$$

Proporsi komisaris independen pada penelitian ini di ukur berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Marlinda et al. (2020)

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian**

**B. Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh lembaga di luar perusahaan atau pihak institusional (Siregar et al., 2005). Besar kecilnya kepemilikan institusional akan berpengaruh terhadap kebijakan yang diambil oleh perusahaan sehingga akan berdampak terhadap *tax avoidance*. Kepemilikan institusional dapat diukur dengan jumlah presentase saham yang dimiliki oleh pihak-pihak institusional dibagi dengan jumlah saham yang diterbitkan, sebagai berikut :

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{jumlah saham yang dimiliki institusi}}{\text{jumlah saham yang diterbitkan}}$$

**C. Komite Audit**

Komite audit merupakan komite yang dibentuk dengan tujuan untuk membantu tugas dan tanggung jawab dewan komisaris. Tanggung jawab komite audit untuk melakukan analisa informasi laporan keuangan apakah sudah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga keberadaan komite audit memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 dan jumlah anggota komite audit sekurang-kurangnya harus terdiri dari 3 anggota termasuk ketua komite audit. Komite audit dapat diukur menggunakan jumlah anggota komite audit di perusahaan, sebagai berikut :

$$\text{Komite Audit} = \text{jumlah anggota komite audit}$$

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian**

**D. Ukuran Perusahaan**

Ukuran perusahaan adalah skala kategori besar atau kecilnya suatu perusahaan yang dapat dilihat melalui jumlah aset yang dimiliki. Berdasarkan penelitian oleh Tandean (2017), ukuran perusahaan dapat diukur dengan hasil logaritma natural dari total asset (*natural logarithm total asset*). Pengukuran tersebut dengan pertimbangan total aset perusahaan lebih stabil jika dibandingkan dengan jumlah penjualan dan nilai kapitalisasi pasar , sebagai berikut

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Ln} (\text{total asset})$$

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**Tabel 3. 1**  
**Operasional Variabel**

No	Variabel	Jenis	Indikator	Rumus	Skala
1	<i>Tax avoidance</i>	Dependen	ETR	$\frac{\text{total beban pajak penghasilan}}{\text{laba sebelum pajak}}$	Rasio
2	Dewan Komisaris Independen	Independen	DKI	$\frac{\text{jumlah komisaris independen}}{\text{jumlah anggota dewan komisaris}}$	Rasio
3	Kepemilikan Institusional	Independen	KI	$\frac{\text{jumlah saham yang dimiliki institusi}}{\text{jumlah saham yang diterbitkan}}$	Rasio
4	Komite Audit	Independen	KA	<i>jumlah komite audit</i>	Rasio
5	Ukuran Perusahaan	Independen	SIZE	<i>Ln (total asset)</i>	Rasio

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi teknik observasi. Teknik observasi adalah suatu teknik yang melibatkan kegiatan melihat, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan perilaku, tindakan atau peristiwa secara terencana (Uma & Roger, 2013). Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder (*secondary data*) yang dikumpulkan oleh peneliti mengarah pada informasi dari sumber-sumber yang sudah ada (Uma & Roger, 2013). Data sekunder yang digunakan antara lain :

Data sekunder yang digunakan antara lain :

1. Data mengenai laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan di sektor *energy* dan *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode pengamatan 2018-2021.



2. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah total beban pajak penghasilan, laba sebelum pajak, jumlah komisaris independen, jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan, jumlah saham yang dimiliki oleh pihak institusi, jumlah saham yang diterbitkan perusahaan, jumlah anggota komite audit, dan total jumlah aset yang dimiliki perusahaan.

## E. Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini, sampel yang diambil adalah *non-probability sampling* menggunakan metode *purposive sampling*. *Non-probability sampling* adalah teknik sampling yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama untuk seluruh anggota populasi yang akan dipilih menjadi sampel. Sedangkan metode *purposive sampling* atau dapat disebut juga *judgmental sampling* adalah pengambilan sampel yang didasari oleh kriteria atau penilaian tertentu. Data yang akan dijadikan sampel, dikumpulkan dengan meneliti laporan keuangan perusahaan sektor energy dan basic materials melalui kriteria-kriteria yang sudah ditentukan. Kriteria ditentukan dengan tujuan untuk memudahkan peneliti dalam menelusuri situasi atau obyek laporan keuangan. Adapun kriteria - kriteria yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut :

1. Perusahaan sub sektor *energy* dan *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Perusahaan tidak listing atau IPO di luar periode penelitian yaitu 2020 – 2023.
3. Perusahaan tidak memiliki laba negatif atau rugi.
4. Perusahaan memiliki Effective Tax Rate tahun 2018 sampai 2019 lebih kecil dari 25% dan tahun 2020 sampai 2021 lebih kecil dari 22%

5. Perusahaan mengungkapkan penyajian data yang lengkap sehingga sesuai dengan keperluan penelitian tiap variabel.

**Tabel 3. 2**  
**Kriteria Pengambilan Sampel**

Perusahaan sub sektor <i>energy</i> dan <i>basic materials</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)	175 perusahaan
Dikurang :	
Perusahaan listing atau IPO di luar periode tahun penelitian yaitu 2020 – 2023.	29 perusahaan
Perusahaan memiliki laba negatif atau rugi.	66 perusahaan
Perusahaan memiliki Effective Tax Rate tahun 2019 lebih besar dari 25% dan tahun 2020 sampai 2021 lebih kecil dari 22%	54 perusahaan
Perusahaan tidak menyajikan data yang lengkap sehingga tidak memenuhi keperluan penelitian tiap variabel.	16 perusahaan
Jumlah perusahaan yang menjadi sampel penelitian	10 perusahaan
Tahun pengamatan penelitian	4 tahun
Jumlah total data sampel penelitian (4 tahun x 10 perusahaan)	40 sampel

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





## F. Teknik Analisis Data

### 1. Uji Kesamaan Koefisien Regresi / Pooling

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan campuran antara data *time series* dan *cross-sectional*, sehingga sebelum pengujian dilakukan perlu diketahui apakah data dapat dilakukan. Berikut langkah – langkah pengujian data *pooling* sebagai berikut :

- a. Pengujian menggunakan variabel dummy untuk 4 tahun yang diteliti,  
Dummy 1 akan bernilai 1 untuk tahun 2018, selainnya adalah 0.  
Dummy 2 akan bernilai 1 untuk tahun 2019, selainnya adalah 0.  
Dummy 3 akan bernilai 1 untuk tahun 2020, selainnya adalah 0.
- b. Regresi dengan variabel lain
- c. Kriteria hasil uji kesamaan koefisien regresi adalah :

(1) Jika nilai  $\text{sig} < \alpha (0,05)$ , maka terdapat perbedaan koefisien dan tidak dapat dilakukan pooling. Oleh karena itu, pengujian data penelitian harus dilakukan per-tahun.

(2) Jika nilai  $\text{sig} > \alpha (0,05)$ , maka tidak terdapat perbedaan koefisien dan dapat dilakukan pooling. Oleh sebab itu, pengujian data penelitian dapat dilakukan selama periode penelitian dalam 1 kali uji.

### 2. Statistik Deskriptif

Berdasarkan Ghazali (2018:19), statistik deskriptif memiliki fungsi untuk memberi deskripsi atau gambaran dari data dengan melihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis serta skewness (kemencengan distribusi). Sesuai dengan nama statistik deskriptif, deskriptif dapat diartikan hanya memberikan deskripsi mengenai keadaan suatu gejala yang telah dicatat menggunakan alat



ukur dan diolah sesuai dengan fungsinya, kemudian hasil pengolahan disajikan dalam bentuk angka sehingga data lebih mudah untuk dipahami,.

Analisis statistik deskriptif pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui nilai statistik atas variabel-variabel yang diteliti dalam penelitian, yakni dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit, dan ukuran perusahaan.

### 3. Uji Asumsi Klasik

Pada penelitian ini uji asumsi klasik dibutuhkan bertujuan untuk mengetahui model regresi yang digunakan sudah terbebas dari penyimpangan asumsi dan memenuhi syarat untuk mendapatkan linier yang baik sebelum dilakukan pengujian regresi. Peneliti melakukan uji asumsi klasik dengan melakukan uji normalitas, uji multikolonieritas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas.

#### a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji model regresi yang digunakan apakah variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal, (Ghozali, 2018:161). Secara umum diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwasannya nilai residual mengikuti distribusi normal. Nilai residual dapat dikatakan berdistribusi normal jika nilai probabilitas signifikan lebih besar dari 0,05 yang dilihat adalah hasil uji menggunakan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Jika asumsi tersebut dilanggar, maka uji normalitas dapat dikatakan tidak valid. Menurut (Ghozali, 2018:162) uji normalitas dapat dilakukan dengan langkah :

#### (1) Hipotesis

Ho : hasil uji data dapat berdistribusi secara normal

Ha : hasil uji data tidak dapat berdistribusi secara normal



(2) Tingkat kesalahan adalah  $(\alpha) = 0,05$  (5%)

**(3) Kriteria pengambilan keputusan**

Hipotesis  $H_0$  diterima jika hasil pengujian lebih besar dari tingkat kesalahan 0,05 (5%), jika sebaliknya maka hipotesis  $H_a$  diterima dengan arti data tidak berdistribusi secara normal.

**b) Uji Multikolonieritas**

Uji multikolonieritas memiliki tujuan untuk menguji model regresi apakah dalam penelitian ditemukan korelasi antar variabel bebas (variabel independen), sehingga model regresi yang baik seharusnya tidak ditemukan korelasi di antara variabel independen, Ghozali (2018:107). Variabel independen dapat dikatakan tidak ortogonal jika variabel saling berkorelasi. Variabel ortogonal merupakan variabel independent yang memiliki nilai korelasi antar variabel independen sama dengan nol. Mendeteksi multikolinieritas dapat diamati dengan melihat *tolerance value* dan VIF (Variance Inflation Factor) dari hasil pengujian.

Syarat untuk mendeteksi multikolonieritas dapat diamati melalui batas *tolerance value* adalah lebih besar dari 0,10 sedangkan batas VIF adalah lebih kecil dari 10 maka tidak terjadi multikolonieritas. Apabila hasil pengujian menunjukkan sebaliknya, maka terjadi multikolonieritas dalam model regresi tersebut, (Ghozali, 2018:108-109).

**g) Uji Heterokedastisitas**

Berdasarkan Ghozali (2018:137) uji heterokedastisitas memiliki tujuan untuk menguji model regresi apakah terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Varians residual disebut homoskedastisitas jika varians residual satu pengamatan yang lain tetap, tetapi apabila berbeda maka disebut heterokedastisitas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**(C) Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Homoskedastisitas merupakan model regresi yang baik atau dapat dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas. Penelitian ini menguji heteroskedastisitas dengan metode

uji park, menurut Ghozali (2018:140-142) dapat dilakukan dengan cara :

- (1) Memperoleh nilai Sig. pada table *coefficients*
- (2) Hasil pengujian dengan tingkat kesalahan ( $\alpha$ ) = 0,05 (5%)
- (3) Kriteria pengambilan keputusan
  - (a) Model regresi terjadi heteroskedastisitas apabila nilai Sig.  $< \alpha$  0,05 (5%)
  - (b) Model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas apabila nilai Sig.  $> \alpha$  0,05 (5%)

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi memiliki tujuan untuk menguji model regresi linear memiliki korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Problem autokorelasi dikatakan apabila terjadi korelasi pada model regresi. Terdapat autokorelasi dikarenakan observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Hal tersebut sering ditemukan pada data yang memiliki runtut waktu (*time series*) karena “gangguan” yang terjadi pada individu tau kelompok cenderung untuk mempengaruhi “gangguan” terhadap individu atau kelompok yang sama dalam periode berikutnya. Menurut Ghozali (2018:111-112) model regresi yang baik adalah regresi yang terbebas dari autokorelasi.

Autokorelasi dapat dideteksi dengan uji *Run Test*. Uji *run test* dapat digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau sistematis. Hipotesis yang digunakan dalam uji Run test Ghozali (2018:121-122), yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



$H_0$  : residual (res\_1) random (acak).

$H_a$  : residual (res\_1) tidak random.



Hak cipta milik IBI KIS (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dasar pengambilan keputusan uji run test adalah :

- (1) Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) < dari 0,05 maka terdapat gejala autokorelasi.
- (2) Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) > dari 0,05 maka tidak terdapat gejala autokorelasi.

#### 4. Analisis Regresi Linear Ganda

Pada dasarnya analisis regresi merupakan studi mengenai ketergantungan variabel terikat dengan satu atau lebih variabel bebas dengan tujuan mengestimasi dan/atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel terikat yang disarkan dengan nilai variabel bebas yang diketahui, Gujarati (2003) dalam (Ghozali, 2018:95). Selain untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, analisis regresi linear berganda bisa menunjukkan arah hubungan antar variabel bebas dengan variabel terikat. Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh lebih dari satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat (Ghozali, 2018:95)

Dalam landasan analisis regresi untuk mengestimasi variabel dependen, biasanya disebut dengan Ordinary Least Squares (pangkat kuadrat kecil biasa). Metode OLS membantu untuk meminimalisasi jumlah kuadrat dengan mengestimasi suatu garis regresi dari kuadrat kesalahan (Ghozali, 2018:96). Analisis regresi berganda digunakan bertujuan untuk membuktikan hipotesis mengenai pengaruh dari dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. Model yang digunakan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y = \alpha_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \epsilon$$

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Keterangan :

$Y$  = *Tax avoidance*

$\alpha_0$  = Konstanta

$\beta_1 \beta_2 \beta_3 \beta_4$  = Koefisien Regresi

$X_1$  = Dewan Komisaris Independen

$X_2$  = Kepemilikan Institusional

$X_3$  = Komite Audit

$X_4$  = Ukuran Perusahaan

$\epsilon$  = Error

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### 5. Pengujian Hipotesis

Dalam penelitian ini, pengujian hipotesis diuji menggunakan :

a. Uji statistik F

Tujuan pengujian statistik F dalam penelitian ini adalah mengetahui apakah variabel independen mempunyai pengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018:179). Hipotesis akan di uji dengan pernyataan bahwa

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$  secara simultan sama dengan nol, atau :

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_k = 0$$

$$H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \dots \neq \beta_k \neq 0$$

Uji F memiliki kriteria dengan tingkat signifikansi sebesar 5% atau 0,05. Jika hasil uji diperoleh nilai signifikansi lebih kecil dari 5% dapat disimpulkan seluruh variabel independen secara simultan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen, namun apabila nilai signifikansi menunjukkan hasil lebih besar dari 5% dapat disimpulkan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.

bahwa seluruh variabel independen tidak berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018:180).

**C** Uji statistik t

Pada penelitian ini dilakukan pengujian hipotesis dengan uji statistik t. Uji statistik t bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen secara individual terhadap variabel yang terikat atau dependen. Menurut (Ghozali, 2018:179) dalam pengambilan keputusan dapat dilihat melalui tabel coefficients kemudian melihat hasil signifikansi. Apabila nilai signifikansi menunjukkan hasil kurang dari 5%, artinya variabel independen secara individual memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Namun, jika nilai signifikansi menunjukkan hasil lebih dari 5%, artinya variabel independen secara individual tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen Ghozali (2018:179-180). Hipotesis statistik pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

(1) Hipotesis 1 :  $H_0 = \beta_1 = 0$

:  $H_a = \beta_1 < 0$

(2) Hipotesis 2 :  $H_0 = \beta_2 = 0$

:  $H_a = \beta_2 > 0$

(3) Hipotesis 3 :  $H_0 = \beta_3 = 0$

:  $H_a = \beta_3 < 0$

(4) Hipotesis 4 :  $H_0 = \beta_4 = 0$

:  $H_a = \beta_4 > 0$

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



c. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

**C** Koefisien Determinasi menurut Ghozali (2018:179) untuk mengukur seberapa jauh kontribusi variabel bebas dalam menjelaskan variasi dari variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu, jika nilai menjauhi 1 dan mendekati 0 menjelaskan arti bahwa variabel independen tidak mempunyai kemampuan untuk memberikan penjelasan atau sangat terbatas dalam memberi informasi yang diperlukan, jika hasil menunjukkan sebaliknya maka dapat dikatakan variabel independen dapat memberikan informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2018:179). Semakin tinggi nilai  $R^2$  memiliki arti semakin baik model penelitian yang diajukan.

Koefisien determinasi dapat dilihat melalui nilai  $R^2$  pada tabel Model Summary. Nilai koefisien determinasi adalah  $0 \leq R^2 \leq 1$ , dimana:

- (1) Apabila  $R^2 = 0$ , maka model regresi berbentuk tidak sempurna, menandakan variabel independen tidak mampu menjelaskan variasi pada variabel dependen
- (2) Apabila  $R^2 = 1$ , maka model regresi berbentuk sempurna, menandakan variabel independen mampu menjelaskan variasi pada variabel dependen secara akurat.
- (3) Apabila  $R^2$  mendekati 1, semakin akurat model regresi yang terbentuk untuk menjelaskan hampir seluruh informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen

Pada umumnya jenis data silang (crosssection) koefisien determinasinya relatif lebih rendah dikarenakan adanya variasi besar antar masing-masing pengamatan, sedangkan koefisien determinasi untuk jenis data runtun waktu (time series) relatif lebih tinggi. Penambahan satu variabel independen akan menyebabkan  $R^2$  meningkat, sehingga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



banyak peneliti yang memberi saran apabila ingin mengevaluasi model regresi yang

**C**terbaik disarankan menggunakan nilai adjusted  $R^2$ . Dalam kenyataan nilai adjusted  $R^2$  dapat bernilai negatif, walaupun yang dikehendaki harus bernilai positif.

**Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## BAB IV

### HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini terdiri dari 10 perusahaan dari sektor *energy* dan *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hasil dari penelitian dan pembahasan terhadap hipotesis yang ditentukan akan dibahas dalam bab ini. Peneliti akan membahas hasil dari penelitian yang diperoleh dari hasil olahan program IBM SPSS 25.0.

Peneliti akan membahas gambaran umum dari objek yang digunakan dalam penelitian terdiri dari karakteristik obyek penelitian. Kemudian, hasil penelitian digunakan untuk membantu peneliti untuk menarik kesimpulan dari hipotesis yang sudah tentukan dalam penelitian ini. Pada bab ini juga akan membahas proses analisis dan pembahasan konseptual berdasarkan hipotesis yang diterima atau ditolak, setiap sub bab akan disajikan hasil pengujian dari program SPSS untuk mendukung kesimpulan peneliti.

#### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan perusahaan sektor *energy* dan *basic materials* dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2018 – 2021. Pada penelitian ini sample ditentukan menggunakan metode purposive sampling, setelah dilakukan pengolahan data perusahaan yang didasarkan kriteria diperoleh sebanyak 10 perusahaan yang dapat dijadikan sampel dan daftar perusahaan yang dijadikan sampel terlampir pada lampiran. Periode penelitan selama 4 tahun, maka jumlah data yang akan diteliti sebanyak 40 sampel data.



## B. Hasil Penelitian

### 1. Uji Pooling Data

Terlampir hasil pengujian *pooling data* yang di uji menggunakan SPSS 25

**Tabel 4. 1**

#### Hasil Uji Pooling

Uji Pooling Data	Kriteria	Hasil	Keterangan
DKI	Sig. > 0,05	0,642	Data dapat di- <i>pool</i>
KI		0,924	Data dapat di- <i>pool</i>
KA		0,393	Data dapat di- <i>pool</i>
SIZE		0,847	Data dapat di- <i>pool</i>
D1		0,185	Data dapat di- <i>pool</i>
D2		0,774	Data dapat di- <i>pool</i>
D3		0,397	Data dapat di- <i>pool</i>
D1XDKI		0,321	Data dapat di- <i>pool</i>
D1XKI		0,173	Data dapat di- <i>pool</i>
D1XKA		0,324	Data dapat di- <i>pool</i>
D1XSIZE		0,230	Data dapat di- <i>pool</i>
D2XDKI		0,907	Data dapat di- <i>pool</i>
D2XKI		0,746	Data dapat di- <i>pool</i>
D2XKA		0,748	Data dapat di- <i>pool</i>
D2XSIZE		0,780	Data dapat di- <i>pool</i>
D3XDKI		0,693	Data dapat di- <i>pool</i>
D3XKI		0,727	Data dapat di- <i>pool</i>
D3XKA		0,940	Data dapat di- <i>pool</i>
D3XSIZE	0,360	Data dapat di- <i>pool</i>	

Sumber : Data olahan SPSS

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hakipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pada tabel 4.1 menunjukkan hasil uji pooling data yang dibentuk dengan variabel *dummy* (*dummy approach*) dengan tujuan untuk mengetahui penggabungan data time series dengan cross-sectional dapat di uji atau tidak. Hasil uji pooling menunjukkan bahwa DKI, KI, KA, SIZE, D1, D2, D3, D1XDKI, D1XKI, D1XKA, D1XSIZE, D2XDKI, D2XKI, D2XKA, D2XSIZE, D3XDKI, D3XKI, D3XKA, D3XSIZE lebih besar dari 0.05. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa data penelitian dapat dilakukan.

**Analisis Deskriptif**

Uji analisis deskriptif bertujuan untuk mengetahui nilai minimum yang merupakan nilai terendah, maksimum merupakan nilai tertinggi, rata-rata (*mean*) merupakan nilai rerata, serta standar deviasi data sampel dari masing – masing variabel kelompok data penelitian.

**Tabel 4. 2**

**Hasil Uji Deskriptif**

	<b>N</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Mean</b>	<b>Std. Deviasi</b>
ETR	40	0,24842	0,02031	0,1664742	0,06622432
DKI	40	0,33333	0,50000	0,3852381	0,06081792
KI	40	0,44849	0,97730	0,7108285	0,14711682
KA	40	3	4	3,10	0,304
SIZE	40	27,54117	31,44026	29,5369779	1,29665967

Sumber : Data olahan SPSS

Berdasarkan tabel 4.2 hasil uji analisis deskriptif , dapat diambil kesimpulan bahwa Didasari oleh tarif pajak badan Indonesia tahun 2018 sampai 2019 sebesar 25% dan tahun 2020 sampai 2021 adalah 22%. *Tax avoidance* di uji menunjukkan hasil nilai

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- minimum sebesar 24,84% yang dimiliki oleh PT Bayan Resources Tbk di tahun 2019
- C** nilai tersebut mengindikasikan semakin kecil tindakan *tax avoidance* pada perusahaan.
- C** Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
- Nilai maximum menunjukkan hasil sebesar 2,03% dimiliki oleh PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk sehingga nilai tersebut mengindikasikan terjadinya *tax avoidance*.
- Sedangkan nilai rata – rata (*mean*) *tax avoidance* menunjukkan hasil -17,75% dengan standar deviasi 0,06622432
- b** Variabel dewan komisaris independen (DKI) memiliki nilai minimum yang artinya jumlah komisaris independen sebesar 33,3% dari total dewan komisaris. Nilai ini salah satunya dimiliki oleh PT AKR Corporindo Tbk pada tahun 2019. Sedangkan nilai maksimum sebesar 50% yang artinya jumlah komisaris independen sebesar 50% dari total dewan komisaris. Dimana salah satunya dimiliki oleh PT Sillo Maritime Perdana Tbk pada tahun 2019. Sedangkan nilai *mean* atau rata – rata menunjukkan hasil sebesar 38,52% dengan standar deviasi 0.06081792
- c** Variabel kepemilikan institusional (KI) memiliki nilai minimum sebesar 44,85%, artinya 44,85% saham PT Sillo Maritime Perdana Tbk dimiliki institusi. Sedangkan nilai maksimum sebesar 97,73% pada PT Cita Mineral Investindo Tbk pada tahun 2020 dimiliki oleh institusi. Kemudian nilai rata – rata (*mean*) kepemilikan institusional menunjukkan hasil sebesar 71,08% dengan standar deviasi 0.14711682
- c** Variabel komite audit (KA) memiliki nilai minimum sebesar 3 hasil tersebut sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 yang mengharuskan perusahaan untuk memiliki minimal 3 anggota komite audit, dan nilai maksimum sebesar 4. Kemudian nilai rata – rata (*mean*) komite audit adalah 3.10 dan standar deviasi sebesar 0.304

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



e. Variabel ukuran perusahaan (SIZE) menunjukkan nilai logaritme natural minimum sebesar 27,54%, logaritma natural tersebut dimiliki oleh PT Emdeki Utama Tbk tahun 2018 dengan total aset sebesar Rp 914.065.000.000 dan nilai maksimum Ln sebesar 31,44% total aset sebesar Rp 45.116.209.346.000 yang dimiliki oleh PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk tahun 2021. Kemudian nilai rata- rata (*mean*) sebesar 29.5369 dengan standar deviasi sebesar 1,29665967.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### 3. Uji Asumsi Klasik

#### a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi data residual memiliki distribusi normal atau tidak. Berikut hasil pengujian uji normalitas

**Tabel 4. 3**

**Hasil Uji Normalitas**

Nama Pengujian	Kriteria	Hasil	Keterangan
Normalitas	<i>Asymp. Sig. (2tailed)</i> > 0.05	0.025	Data tidak berdistribusi normal

Sumber : Data olahan SPSS

Uji normalitas menggunakan SPSS pada tabel 4.3 diketahui nilai signifikansi dengan statistik *kolmogorov-smirnov* yaitu sebesar 0,025, dapat disimpulkan bahwa nilai residual pengujian lebih kecil dari 0.05 berdistribusi normal dan hipotesis  $H_0$  ditolak. Tetapi berdasarkan teori *central limit* oleh Bowerman et al. (2017:335) bahwa apabila sampel berjumlah lebih besar dari 30 ( $n > 30$ ), dapat disimpulkan data berdistribusi secara normal. Sehingga pada penelitian ini dapat

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dikatakan data yang diuji berdistribusi normal karena data yang dijadikan sampel sebesar 40 sampel.

**C** Uji Multikolonieritas

Pengujian multikolonieritas bertujuan untuk menguji model regresi berkaitan dengan adanya korelasi antara variabel bebas (independen).

**Tabel 4. 4**

**Hasil Uji Multikolinieritas**

Uji Multikolinieritas	Kriteria	Hasil		Keterangan
		Tolerance	VIF	
DKI	<i>Tolerance v. &gt; 0.10, VIF &lt; 10</i>	0,952	1,051	Lolos uji multikolinieritas
KI	<i>Tolerance v. &gt; 0.10, VIF &lt; 10</i>	0,685	1,459	Lolos uji multikolinieritas
KA	<i>Tolerance v. &gt; 0.10, VIF &lt; 10</i>	0,837	1,195	Lolos uji multikolinieritas
SIZE	<i>Tolerance v. &gt; 0.10, VIF &lt; 10</i>	0,645	1,550	Lolos uji multikolinieritas

Sumber : Data olahan SPSS

Hasil uji multikolinieritas masing – masing variabel independent berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan hasil nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF <10. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa data yang di uji antara variabel indepen dalam model regresi tidak terjadi multikolinieritas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**C** Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



c. Uji Heterokedastisitas

Ⓒ Pengujian heterokedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan variance residual satu pengamatan ke pengamatan lain dalam model regresi.

**Tabel 4. 5**

**Hasil Uji Heterokedastisitas**

Uji Heterokedastisitas	Kriteria	Hasil	Keterangan
DKI	Sig. > 0.05	0,649	Lolos uji heterokedastisitas
KI	Sig. > 0.05	0,193	Lolos uji heterokedastisitas
KA	Sig. > 0.05	0,058	Lolos uji heterokedastisitas
SIZE	Sig. > 0.05	0,222	Lolos uji heterokedastisitas

Sumber : Data olahan SPSS

Hasil uji data heterokedastisitas pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa nilai sig > 0,05.

Maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini model regresi yang di uji tidak terjadi heterokedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi dilakukan dengan metode uji *run test*, dengan tujuan mengetahui apakah model regresi linear terjadi korelasi sepanjang waktu yang berkaitan satu sama lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Ⓒ Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





**Tabel 4. 6**

**Hasil Uji Autokorelasi**

Nama Pengujian	Kriteria	Hasil	Keterangan
Autokorelasi	<i>Asymp. Sig (2tailed) &gt; 0.05</i>	0,873	Lolos uji autokorelasi

Sumber : Data olahan SPSS

Hasil uji autokorelasi pada tabel 4.6 menunjukkan hasil nilai asymp.sig (2-tailed) adalah 0,873 dengan arti hasil pengujian lebih besar dari kriteria yang ditentukan yaitu 0,05. Dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala autokorelasi, sehingga analisis regresi linear dapat dilanjutkan.

4. Analisis Regresi Liner Berganda

Hasil perhitungan analisis linear berganda menunjukkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 4. 7**

**Hasil Uji Analisis Regresi**

Uji Analisis Regresi	Koefisien
Constant	-0,609
DKI	0,160
KI	0,100
KA	-0,099
SIZE	0,021

Sumber : Data olahan SPSS

Dari tabel 4.7 yang menunjukkan hasil regresi tersebut dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$TA = -0,609 + 0,160DKI + 0,100KI - 0,099KA + 0,021SIZE$$

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Keterangan :

- TA = *Tax avoidance*
- DKI = Dewan Komisaris Independen
- KI = Kepemilikan Institusional
- KA = Komite Audit
- SIZE = Ukuran Perusahaan

Persamaan regresi tersebut memiliki nilai konstanta -0,609 yang menunjukkan besarnya *Tax avoidance*. Persamaan tersebut menunjukkan besar kekuatan variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen yang ditunjukkan dari besar koefisien masing-masing variabel independen.

5. Uji Hipotesis Penelitian

Tabel 4. 8

Hasil Uji Hipotesis

Nama Pengujian	Variabel	Kriteria	B	Sig.	Keterangan
Uji F	DKI, KI, KA, SIZE	Sig. < 0,05		0,042	Ha diterima
Uji t	DKI	Sig. < 0,05	0,160	0,168	Ha ditolak
	KI		0,100	0,111	Ha ditolak
	KA		-0,099	0,004	Ha diterima
	SIZE		0,021	0,016	Ha diterima
Koefisien Determinasi	Nilai R <sup>2</sup> = 0,241 atau 24,1%				

a. Uji Statistik F

Dasar pengujian statistik F untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau secara simultan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

Pada tabel 4.8 yang menunjukkan hasil uji signifikansi simultan F yaitu sig. 0,042 <

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)



0,05, maka dapat disimpulkan bahwa  $H_a$  diterima. Dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit dan ukuran perusahaan secara simultan atau bersama – sama memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

**b Uji statistik t**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dasar pengujian statistik t untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individual terhadap variasi variabel dependen. Berikut penjabaran dari hasil uji signifikansi parameter individual atau t pada tabel 4.8 pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen :

- (1) Koefisien untuk variabel dewan komisaris independent sebesar 0,160 dengan nilai hasil sig. sebesar 0,168 artinya  $> \alpha = 0,05$ . Dapat disimpulkan bahwa hipotesis  $H_{a1}$  ditolak dengan arti dewan komisaris independent tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
- (2) Koefisien untuk variabel kepemilikan institusional sebesar 0,100 dengan hasil sig menunjukkan sebesar 0,111 artinya  $< \alpha = 0,05$ . Dapat disimpulkan bahwa hipotesis  $H_{a2}$  ditolak dengan arti kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.
- (3) Koefisien untuk variabel komite audit sebesar -0,099 dengan nilai sig. sebesar 0,004 artinya  $< \alpha = 0,05$ . Dapat disimpulkan bahwa hipotesis  $H_{a3}$  diterima , yaitu komite audit cukup bukti berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.
- (4) Koefisien untuk variabel ukuran perusahaan sebesar 0,021 dan nilai sig. sebesar 0,016 artinya  $< \alpha = 0,05$ . Dapat disimpulkan bahwa hipotesis  $H_{a4}$  diterima dengan arti ukuran perusahaan cukup bukti berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.



### c. Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi nilai  $R^2$  (*R Square*) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen, sementara sisanya adalah yang tidak mampu dijelaskan yang merupakan bagian variasi dari variabel lain tetapi tidak termasuk dalam model penelitian.

Hasil uji koefisien determinasi pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa model *summary* besarnya *adjusted R<sup>2</sup>* adalah 0,241, ketika hasil  $R^2$  mendekati angka 1 model regresi menyediakan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Hasil uji  $R^2$  membuktikan bahwa 24,1% variasi *tax avoidance* dijelaskan oleh keempat variabel independen yaitu dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit, dan ukuran perusahaan. Sedangkan sisanya 75,9% dijelaskan oleh variasi lain di luar model.

### C. Pembahasan

Hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukkan model regresi yang digunakan layak untuk digunakan. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan maka berikut pembahasannya :

#### 1. Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap *Tax avoidance*

Dalam hipotesis peneliti menyatakan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Didasarkan hasil pengujian statistik t, diperoleh hasil koefisien regresi sebesar 0,160 dengan hasil sig. sebesar 0,336 lebih besar dari  $\alpha = 0,05$ . Melalui hasil pengujian yang dilakukan, menunjukkan hasil bahwa komisaris independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Dengan demikian hipotesis yang diajukan peneliti (H1) ditolak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



Hasil pengujian menunjukkan bahwa tingkat perusahaan melakukan *tax avoidance* tidak dapat ditentukan oleh variabel dewan komisaris independen. Menurut Wahyudi (2014) mungkin yang dapat memberikan pengaruh pada perusahaan dalam melakukan *tax avoidance* jika komisaris independen memiliki pengetahuan yang cukup dalam bidang keuangan dan perpajakan, dan bukan hanya sekedar eksistensi dan jumlah anggota dari komisaris independen. Apabila komisaris independen dalam perusahaan memiliki keahlian dalam bidang keuangan dan perpajakan, perusahaan memiliki peluang yang lebih besar untuk melakukan *tax avoidance*. Sebagai contoh, PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia memiliki komisaris independen sebanyak 3 anggota tetapi menunjukkan hasil tarif ETR sebesar 3,04% pada tahun 2020 nilai tersebut mengindikasikan perusahaan melakukan *tax avoidance*, sedangkan PT Samindo Resources Tbk pada tahun 2018 hanya memiliki 1 dewan komisaris dengan hasil ETR sebesar 24,78% nilai tersebut mengindikasikan tindakan perusahaan melakukan *tax avoidance* sangat kecil. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wahyudi, 2014) dan Praditasari & Setiawan (2017), yang menyatakan komisaris independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*.

## 2. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax avoidance*

Dalam hipotesis peneliti menyatakan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Didasarkan hasil pengujian statistik t, diperoleh hasil koefisien regresi 0,100 dan hasil sig. sebesar 0,222 lebih besar dari  $\alpha = 0,05$ . Melalui hasil pengujian, menunjukkan bahwa kepemilikan insstitusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Dengan demikian hipotesis yang diajukan (H2) ditolak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



Hasil pengujian menunjukkan bahwa tingkat perusahaan melakukan *tax avoidance* tidak dapat ditentukan oleh variabel kepemilikan institusional. Menurut Tandssean (2017) penyebab dugaan kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* karena pemilik institusional tidak berperan secara langsung dalam memantau tindakan oportunitis atau penyebab lainnya karena pemilik institusional memiliki sifat egois sehingga lebih mementingkan untuk memaksimalkan kesejahteraannya dalam peningkatan laba yang akan diterima pemilik institusional. Sebagai contoh, kepemilikan PT Cita Mineral Investindo Tbk dimiliki oleh pihak institusi sebesar 97,3% dengan ETR -22,5% pada tahun 2019 indikasi perusahaan melakukan *tax avoidance* sangat kecil. Sedangkan kepemilikan PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk pada tahun 2018 hanya sebesar 59,67% dengan ETR -2% indikasi perusahaan melakukan *tax avoidance* sangat besar. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Damayanti & Susanto (2016) dan Tandean (2017) yang menyatakan kepemilikan institusional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*.

### 3. Pengaruh Komite Audit Terhadap *Tax avoidance*

Dalam hipotesis peneliti menyatakan komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Didasarkan hasil pengujian statistik t, diperoleh hasil koefisien regresi sebesar -0,099 dan sig. menunjukkan hasil 0,008 lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$ . Melalui hasil pengujian, menunjukkan bahwa komite audit cukup bukti berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Bukti pengujian menunjukkan bahwa hipotesis (H3) diterima.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa tingkat perusahaan melakukan *tax avoidance* dapat dipengaruhi oleh variabel komite audit. Dapat dikatakan peran dan tanggung jawab komite audit dalam membantu aktivitas monitoring pelaporan eksternal perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KGG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKGG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKGG.



Komite audit pun memberikan peran untuk melakukan analisa terhadap ketaatan emiten terhadap peraturan undang-undang yang berlaku. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sandy & Lukviarman (2015) dan Praditasari & Setiawan (2017) yang menyatakan komite audit berpengaruh secara negatif terhadap *tax avoidance*.

#### 4. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax avoidance*

Dalam hipotesis peneliti menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Didasarkan hasil pengujian statistik t, diperoleh hasil koefisien regresi sebesar 0,021 dengan nilai sig. 0,032 lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$ . Melalui hasil pengujian, menunjukkan bahwa komite audit cukup bukti berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Bukti pengujian menunjukkan bahwa hipotesis (H2) diterima.

Hasil pengujian membuktikan bahwa tingkat perusahaan dalam melakukan *tax avoidance* dapat dipengaruhi oleh ukuran perusahaan. Jika semakin besar ukuran perusahaan akan berpengaruh terhadap peningkatan laba yang besar sehingga akan berdampak terhadap pembayaran pajak yang semakin meningkat dan semakin besar ukuran suatu perusahaan akan berpotensi perusahaan memiliki sumber daya manusia yang ahli di bidang pengelolaan perpajakan, sehingga akan memudahkan perusahaan dalam menekan pembayaran pajak dan meningkatkan tindakan *tax avoidance* dalam mengelola beban pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Marlinda et al. (2020) dan Sandra & Edeline (2018) yang menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik ISI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang telah diuji menggunakan SPSS versi 25.0. Kemudian penelitian akan memberikan saran-saran bagi peneliti selanjutnya yang dapat digunakan sebagai referensi dan perkembangan penelitian selanjutnya.

#### A. Kesimpulan

Hasil penelitian pada pengujian variabel dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* menunjukkan hasil sebagai berikut :

1. Dewan komisaris independen tidak cukup bukti untuk berpengaruh terhadap *tax avoidance*
2. Kepemilikan institusional tidak cukup bukti untuk berpengaruh terhadap *tax avoidance*
3. Komite audit cukup bukti berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*
4. Ukuran perusahaan cukup bukti berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

#### B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan di bab sebelumnya, peneliti memberikan saran pengembangan bagi peneliti selanjutnya,

1. Bagi peneliti selanjutnya
  - a. Peneliti selanjutnya, dapat meneliti proksi *tax avoidance* lainnya misalnya menggunakan cash ETR dan current ETR.





b. Pengukuran good corporate governance dapat menggunakan mekanisme *good corporate governance* lain seperti frekuensi rapat, komposisi dan ukuran dewan direksi, rapat umum pemegang saham kepemilikan manajerial, dan lainnya.

c. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan atau meneliti sampel data dari perusahaan sektor lain.

Hak Cipta: Dilindungi Undang-Undang

## 2. Bagi Investor

Investor sebaiknya memberikan perhatian terhadap praktik *tax avoidance* dalam pemilihan investasi agar dapat melihat lebih bijaksana dalam menilai resiko atas investasi tersebut.

Investor harus lebih memperhatikan pelaksanaan good corporate governance di perusahaan agar investor dapat memperoleh hasil laporan atas hasil investasi yang sebenarnya.

## 3. Bagi Direktorat Jendral Pajak

Direktorat Jendral Pajak dalam memprediksi perusahaan melakukan tindakan *tax avoidance* dapat dilihat melalui jumlah komite audit yang rendah dan ukuran perusahaan yang besar.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amri, M. (2017). Pengaruh Kompensasi Manajemen Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Moderasi Diversifikasi Gender Direksi Dan Preferensi Risiko Eksekutif Perusahaan Di Indonesia. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 9(1), 1. <https://doi.org/10.17509/jaset.v9i1.5253>
- Arinta, Y. N. (2018). *Pengaruh Corporate Governance Islam terhadap Tax avoidance* Yusvita. 6(2), 69–86.
- Bowerman, B. L., O'connell, R. T., & Murphree, E. S. (2017). Business Statistics in Practice. In *MSOR Connections* (Vol. 3, Nomor 2). <https://doi.org/10.11120/msor.2003.03020046>
- Committee, C. (1992). The Financial Aspect of Corporate Governance. *The Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance and Gee and Co. Ltd.*, 19(No 76), pp 343-52.
- Cooper, D. R., & Schindler, P. S. (2017). Business Research Methods. In *Proceedings of the Annual Reliability and Maintainability Symposium*. <https://doi.org/10.1109/arms.1991.154456>
- Damayanti, F., & Susanto, T. (2016). Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institutional, Risiko Perusahaan Dan Return on Assets Terhadap *Tax avoidance*. *Esensi*, 5(2), 187–206. <https://doi.org/10.15408/ess.v5i2.2341>
- Eisenhardt, K. M. (1989). Linked references are available on JSTOR for this article : Agency Theory : An Assessment and Review. *Academy of Management*, 14(1), 57–74.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Governance, K. N. K. (2006). Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia. *Nucl. Phys.*, 13(1), 104–116.
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2–3), 127–178. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002>
- Hidayat, N. S. (Sekolah T. I. E. I. (2020). Pengaruh Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax avoidance*. *Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(2), 143–151. <https://doi.org/10.46306/rev.v1i2.16>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1989). Racial diversity and its asymmetry within and across hierarchical levels: The effects on financial performance. *Human Relations*, 72(10), 1671–1696. <https://doi.org/10.1177/0018726718812602>
- Kementerian BUMN. (2012). Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor : SK-16/S.MBU/2012. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 4, Nomor 2, hal. 193–201).
- Koming, N., & Praditasari, A. (2017). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Pengaruh Good Corporate Governance , Ukuran Perusahaan , Leverage Dan Profitabilitas Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana ( Unud )*, Bali , Indonesia *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana ( Unud )*. 19, 1229–1258.





- Manossoh, H. (2016). *Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan*. PT. Norlive Kharisma Indonesia.
- Marlinda, D. E., Titisari, K. H., & Masitoh, E. (2020). Pengaruh Gcg, Profitabilitas, Capital Intensity, dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax avoidance*. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 39. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.86>
- Mulyani, S., Wijayanti, A., & Masitoh, E. (2018). Pengaruh Corporate Governance Terhadap *Tax avoidance* (Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 3(1), 322–340. <https://doi.org/10.31093/jraba.v3i1.91>
- Nadiman, N., & Puspitasari, C. (2017). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax avoidance*) Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2010-2012. *Jurnal Akuntansi*, 18(3), 408–421. <https://doi.org/10.24912/ja.v18i3.273>
- Oktavia, V., Ulfi, J., & Kusuma, J. wijaya. (2020). Pengaruh Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax avoidance* (Pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang Terdaftar di BEI Periode 2015 - 2018). *Jurnal Revenue*, 01(02), 143–151.
- Ohviana, A., & Muid, D. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap *Tax avoidance*. *Jurnal Ekonomi Perjuangan*, 8(1), 1–11. <https://doi.org/10.36423/jumper.v4i1.961>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2014). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik*. [https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-tentang-Direksi-dan-Dewan--Komisaris-Emiten-atau-Perusahaan-Publik/POJK 33. Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.pdf](https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-tentang-Direksi-dan-Dewan--Komisaris-Emiten-atau-Perusahaan-Publik/POJK%2033-Direksi-dan-Dewan-Komisaris-Emiten-Atau-Perusahaan-Publik.pdf)
- Otoritas Jasa Keuangan. (2015). POJK No 55 /POJK.04/2015 Tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. *Ojk.Go.Id*, 1–29. [http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/lembaga-keuangan-mikro/peraturan-ojk/Documents/SAL-POJK PERIZINAN FINAL F.pdf](http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/lembaga-keuangan-mikro/peraturan-ojk/Documents/SAL-POJK%20PERIZINAN_FINAL_F.pdf)
- Pamudji, S., & Trihartati, A. (2010). Pengaruh Independensi Dan Efektivitas Komite Audit Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 2(1), 21–29. <http://journal.unnes.ac.id/index.php/jda>
- Peraturan Pemerintah RI. (2007). Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. In *Pravoslavie.ru* (Vol. 2000).
- Peraturan Pemerintah RI. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008* (Nomor 1).
- Praditasari, N. K., & Setiawan, P. (2017). Pengaruh Good Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Leverage Dan Profitabilitas Pada *Tax avoidance*. *E-Jurnal Akuntansi*, 2017(1), 1229–1258.
- Putri, V. R., & Putra, B. I. (2017). Pengaruh Leverage, Profitability, Ukuran Perusahaan Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax avoidance*. *Jurnal Manajemen Daya Saing*, 19(1), 1–11. <https://doi.org/10.23917/dayasaing.v19i1.5100>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG. 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- Sandra, A., & Edeline, E. (2018). Terhadap *Tax avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2015 Syafrina Agny Islami. *Jurnal Bina Akuntansi*, 5(021), 1–16.
- Sandy, S., & Lukviarman, N. (2015). Pengaruh corporate governance terhadap *tax avoidance*: Studi empiris pada perusahaan manufaktur. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 19(2), 85–98. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol19.iss2.art1>
- Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1997). *a survey of corporate governance*. 52(2), 737–783.
- Siregar, M. P., S. V., & Utama, S. (2005). Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, dan Praktek Corporate Governance terhadap Pengelolaan Laba (Earnings Management). *Sna Viii, September*, 475–490.
- Soehib. (2016). Good Corporate Governance Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan. *Etika Bisnis dan Profesi*, 2(2), 104.
- Suliswanto, S. (2008). *Manajemen Laba* (Vol. 4, Nomor 1). PT. Grasindo.
- Suwito, E., & Herawaty, A. (2005). *SNA VIII Solo, 15 – 16 September 2005*. *September*, 15–16.
- Tandean, V. (2017). *Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax avoidance*. 978–979. [https://dSPACE.uui.ac.id/handle/123456789/33073%0Ahttps://dSPACE.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/33073/13312501 Yapto Rizaldi.pdf?sequence=1](https://dSPACE.uui.ac.id/handle/123456789/33073%0Ahttps://dSPACE.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/33073/13312501%0AYapto%20Rizaldi.pdf?sequence=1)
- Uma, S., & Roger, B. (2013). Research Methods for Business: A Skill-Building Approach. *Leadership & Organization Development Journal*, 34(7), 700–701. <https://doi.org/10.1108/lodj-06-2013-0079>
- Wahyudi, D. (2014). *Pengaruh Good Corporate Governance dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Tax avoidance*.

# LAMPIRAN

## Lampiran 1

### Daftar Data Sampel Kode dan Nama Perusahaan Energy dan Basic Materials

No	Kode	Nama Perusahaan
1	AKRA	PT. AKR Corporindo Tbk.
2	HRUM	PT. Harum Energy Tbk
3	MYOH	PT. Samindo Resources Tbk.
4	SHIP	PT. Sillo Maritime Perdana Tbk.
5	TPMA	PT. Trans Power Marine Tbk.
6	BYAN	PT. Bayan Resources Tbk.
7	CITA	PT. Cita Mineral Investindo Tbk.
8	INTP	PT. Indocement Tunggul Prakarsa Tbk
9	TKIM	PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk.
10	MDKI	PT. Emdeki Utama Tbk.

**© Hakipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

**Lampiran 2**  
**Perhitungan *Tax avoidance* - *Effective Tax Rate* tahun 2018 – 2021.**

No	Kode	Tahun	Total Beban Pajak	Laba Sebelum Pajak	ETR (*-1)
1	AKRA	2018	178.992.445	868.080.622	0,20619
		2019	165.884.121	865.379.704	0,19169
		2020	229.719.593	1.191.716.906	0,19276
		2021	260.061.263	1.395.063.019	0,18642
2	BYAN	2018	172.422.999	696.732.272	0,24747
		2019	77.414.093	311.625.370	0,24842
		2020	82.175.777	426.635.647	0,19261
		2021	361.616.399	1.627.573.741	0,22218
3	CITA	2018	63.663.122.428	724.987.180.923	0,08781
		2019	190.537.780.439	848.256.705.676	0,22462
		2020	189.578.307.160	841.881.871.416	0,22518
		2021	100.967.322.506	669.312.473.099	0,15085
4	HRUM	2018	7.986.048	48.191.469	0,16571
		2019	5.505.306	25.627.895	0,21482
		2020	3.879.082	64.309.373	0,06032
		2021	29.087.809	127.541.480	0,22807
5	INTP	2018	254.291	1.400.228	0,18161
		2019	439.122	2.274.427	0,19307
		2020	341.991	2.148.328	0,15919
		2021	445.506	2.234.002	0,19942
6	MDKI	2018	10.245	44.033	0,23267
		2019	9.627	42.486	0,22659
		2020	10.011	50.096	0,19984
		2021	8.194	47.045	0,17417
7	MYOH	2018	10.518.865	42.447.529	0,24781
		2019	8.826.683	36.925.112	0,23904
		2020	6.476.126	30.009.788	0,21580
		2021	7.640.166	35.596.651	0,21463
8	SHIP	2018	2.390.964	16.848.242	0,14191
		2019	2.486.815	22.013.838	0,11297
		2020	3.239.680	26.085.242	0,12420
		2021	3.390.223	24.384.996	0,13903
9	TKIM	2018	5.093	250.802	0,02031
		2019	18.182	184.698	0,09844
		2020	4.645	152.979	0,03036
		2021	8.527	257.533	0,03311
10	TPMA	2018	526.484	8.132.834	0,06474
		2019	572.264	8.811.513	0,06495
		2020	477.141	2.562.232	0,18622
		2021	508.245	4.467.565	0,11376

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



### Lampiran 3

#### Perhitungan Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit Tahun 2018 – 2021

No	Kode	Tahun	Jumlah Komisaris Independen	Jumlah Dewan Komisaris	DKI	Jumlah Anggota Komite Audit
1	AKRA	2018	1	3	0,3333	3
		2019	1	3	0,3333	3
		2020	1	3	0,3333	3
		2021	1	3	0,3333	3
2	BYAN	2018	2	6	0,3333	4
		2019	2	5	0,4000	4
		2020	2	5	0,4000	5
		2021	2	5	0,4000	4
3	CITA	2018	1	3	0,3333	3
		2019	2	5	0,4000	3
		2020	2	4	0,5000	3
		2021	2	4	0,5000	3
4	HRUM	2018	2	6	0,3333	3
		2019	2	6	0,3333	3
		2020	2	6	0,3333	3
		2021	2	5	0,4000	3
5	NTP	2018	2	6	0,3333	3
		2019	2	6	0,3333	3
		2020	2	6	0,3333	3
		2021	3	7	0,4286	3
6	MDKI	2018	2	5	0,4000	3
		2019	2	5	0,4000	3
		2020	2	5	0,4000	3
		2021	2	5	0,4000	3
7	MYOH	2018	1	3	0,3333	3
		2019	1	3	0,3333	3
		2020	1	3	0,3333	3
		2021	1	3	0,3333	3
8	SHIP	2018	1	2	0,5000	3
		2019	1	2	0,5000	3
		2020	1	2	0,5000	3
		2021	1	2	0,5000	3
9	TKIM	2018	3	7	0,4286	3
		2019	3	7	0,4286	3
		2020	3	7	0,4286	3
		2021	3	7	0,4286	3
10	TPMA	2018	1	3	0,3333	3
		2019	1	3	0,3333	3
		2020	1	3	0,3333	3
		2021	1	3	0,3333	3

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Penguatan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
- b. Penguatan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.

*Lampiran 4*

**Perhitungan Kepemilikan Institusional Tahun 2018 – 2021**

No	Kode	Tahun	Saham Institusi	Saham Beredar	Kepemilikan Institusional
1	AKRA	2018	2.369.056.120,00	4.014.694.920,00	0,5901
		2019	2.369.056.120,00	4.014.694.920,00	0,5901
		2020	2.392.626.120,00	4.014.694.920,00	0,5960
		2021	2.392.626.120,00	4.014.694.920,00	0,5960
2	BYAN	2018	2.815.679.400,00	3.333.333.500,00	0,8447
		2019	2.795.453.600,00	3.333.333.500,00	0,8386
		2020	2.134.303.700,00	3.333.333.500,00	0,6403
		2021	2.173.165.930,00	3.333.333.500,00	0,6519
3	CITA	2018	3.282.667.880,00	3.370.734.900,00	0,9739
		2019	3.280.687.080,00	3.370.734.900,00	0,9733
		2020	3.870.471.542,00	3.960.361.250,00	0,9773
		2021	3.655.942.042,00	3.960.361.250,00	0,9231
4	HRUM	2018	2.002.094.700,00	2.703.620.000,00	0,7405
		2019	2.140.596.200,00	2.703.620.000,00	0,7918
		2020	2.159.774.800,00	2.703.620.000,00	0,7988
		2021	2.159.774.800,00	2.703.620.000,00	0,7988
5	INTP	2018	1.877.480.863,00	3.681.231.699,00	0,5100
		2019	1.877.480.863,00	3.681.231.699,00	0,5100
		2020	1.877.480.863,00	3.681.231.699,00	0,5100
		2021	1.877.480.863,00	3.681.231.699,00	0,5100
6	MDKI	2018	1.946.695.100,00	2.530.150.002,00	0,7694
		2019	1.964.736.500,00	2.530.150.002,00	0,7765
		2020	1.910.761.600,00	2.530.150.002,00	0,7552
		2021	1.909.061.600,00	2.530.150.002,00	0,7545
7	MYOH	2018	1.302.479.275,00	2.206.312.500,00	0,5903
		2019	1.302.479.275,00	2.206.312.500,00	0,5903
		2020	1.302.479.275,00	2.206.312.500,00	0,5903
		2021	1.302.479.275,00	2.206.312.500,00	0,5903
8	SHIP	2018	1.219.790.000,00	2.719.790.000,00	0,4485
		2019	2.219.790.000,00	2.719.790.000,00	0,8162
		2020	2.219.790.000,00	2.719.790.000,00	0,8162
		2021	2.219.790.000,00	2.719.790.000,00	0,8162
9	TKIM	2018	1.857.744.987,00	3.113.223.570,00	0,5967
		2019	1.857.744.987,00	3.113.223.570,00	0,5967
		2020	1.857.744.987,00	3.113.223.570,00	0,5967
		2021	1.857.744.987,00	3.113.223.570,00	0,5967
10	TPMA	2018	2.309.772.200,00	2.633.300.000,00	0,8771
		2019	2.309.772.200,00	2.633.300.000,00	0,8771
		2020	2.309.772.200,00	2.633.300.000,00	0,8771
		2021	1.936.772.200,00	2.633.300.000,00	0,7355

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



## Lampiran 5

### Perhitungan Ukuran Perusahaan

No	Kode	Tahun	Total Aset	Ln (Total Aset)
1	AKRA	2018	19.940.850.599.000,00	30,62
		2019	21.409.046.173.000,00	30,69
		2020	18.683.572.815.000,00	30,56
		2021	23.508.585.736.000,00	30,79
2	BYAN	2018	16.665.660.005.571,00	30,44
		2019	17.766.035.749.823,00	30,51
		2020	22.846.221.435.310,00	30,76
		2021	34.726.639.253.379,00	31,18
3	CITA	2018	3.268.567.743.522,00	28,82
		2019	3.861.308.057.131,00	28,98
		2020	4.134.800.442.987,00	29,05
		2021	4.305.752.389.646,00	29,09
4	HRUM	2018	6.776.951.532.795,00	29,54
		2019	6.213.774.162.554,00	29,46
		2020	7.034.194.756.680,00	29,58
		2021	12.479.975.596.131,00	30,16
5	INTP	2018	28.863.676.000.000,00	30,99
		2019	27.707.749.000.000,00	30,95
		2020	27.344.672.000.000,00	30,94
		2021	26.136.114.000.000,00	30,89
6	MDKI	2018	914.065.000.000,00	27,54
		2019	923.795.000.000,00	27,55
		2020	973.684.000.000,00	27,60
		2021	985.400.000.000,00	27,62
7	MYOH	2018	2.191.353.225.138,00	28,42
		2019	2.226.686.478.948,00	28,43
		2020	2.131.390.456.195,00	28,39
		2021	2.339.681.879.944,00	28,48
8	SHIP	2018	2.616.186.709.881,00	28,59
		2019	3.333.793.410.099,00	28,84
		2020	4.154.823.696.660,00	29,06
		2021	4.644.079.062.770,00	29,17
9	TKIM	2018	42.938.134.416.000,00	31,39
		2019	42.569.463.231.000,00	31,38
		2020	43.346.978.220.000,00	31,40
		2021	45.116.209.346.000,00	31,44
10	TPMA	2018	1.614.306.459.474,00	28,11
		2019	1.551.849.033.384,00	28,07
		2020	1.463.552.671.035,00	28,01
		2021	1.416.289.286.220,00	27,98

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## Lampiran 6

### Hasil Uji Kesamaan Koefisien Regresi (Pooling)

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	-,167	,690		-,242	,811
	DKI	,241	,511	,222	,472	,642
	KI	-,027	,280	-,060	-,096	,924
	KA	-,070	,080	-,320	-,873	,393
	SIZE	,005	,024	,091	,195	,847
	D1	-1,381	1,006	-9,143	-1,373	,185
	D2	-,284	,978	-1,881	-,290	,774
	D3	-,885	1,023	-5,863	-,866	,397
	D1XDKI	,721	,707	1,773	1,019	,321
	D1XKI	,478	,338	2,277	1,415	,173
	D1XKA	-,117	,116	-2,420	-1,011	,324
	D1XSIZE	,040	,032	7,726	1,238	,230
	D2XDKI	,080	,672	,203	,118	,907
	D2XKI	,115	,351	,576	,328	,746
	D2XKA	-,038	,117	-,785	-,325	,748
	D2XSIZE	,009	,034	1,855	,283	,780
	D3XDKI	-,265	,662	-,696	-,400	,693
D3XKI	,129	,366	,630	,354	,727	
D3XKA	-,008	,111	-,174	-,076	,940	
D3XSIZE	,032	,034	6,198	,936	,360	

a. Dependent Variable: ETR

C

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## Lampiran 7

### Hasil Uji Statistik Deskriptif

#### Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TR	40	,02031	,24842	,1664742	,06622432
KI	40	,33333	,50000	,3852381	,06081792
BI	40	,44849	,97730	,7108285	,14711682
KA	40	3	4	3,10	,304
SIZE	40	27,54117	31,44026	29,5369779	1,29665967
Valid N (listwise)	40				

## Lampiran 8

### Hasil Uji Normalitas

#### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,05769033
Most Extreme Differences	Absolute	,150
	Positive	,150
	Negative	-,095
Test Statistic		,150
Asymp. Sig. (2-tailed)		,025 <sup>c</sup>

- Test distribution is Normal.
- Calculated from data.
- Lilliefors Significance Correction.

© Hak cipta milik Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## Lampiran 9

### Hasil Uji Heterokedastisitas

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	-12,915	9,596		-1,346	,187
	DKI	-2,553	5,565	-,075	-,459	,649
	KI	3,596	2,711	,255	1,326	,193
	KA	-2,330	1,188	-,341	-1,960	,058
	SIZE	,394	,317	,246	1,242	,222

a. Dependent Variable: LN\_RES

## Lampiran 10

### Hasil Uji Multikolinieritas

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Coefficients Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-,609	,283		-2,149	,039		
	DKI	,160	,164	,147	,975	,336	,952	1,051
	KI	,100	,080	,221	1,243	,222	,685	1,459
	KA	-,099	,035	-,453	-2,816	,008	,837	1,195
	SIZE	,021	,009	,409	2,229	,032	,645	1,550

a. Dependent Variable: ETR

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

## Lampiran 11

### Hasil Uji Autokorelasi

#### Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value <sup>a</sup>	-,01231
Cases < Test Value	20
Cases >= Test Value	20
Total Cases	40
Number of Runs	22
Z	,160
Asymp. Sig. (2-tailed)	,873

a. Median

## Lampiran 12

### Hasil Uji F (R<sup>2</sup>)

#### ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,041	4	,010	2,780	,042 <sup>b</sup>
	Residual	,130	35	,004		
	Total	,171	39			

a. Dependent Variable: ETR

b. Predictors: (Constant), SIZE, DKI, KA, KI



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





### Lampiran 13

#### Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (t)

##### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	-,609	,283		-2,149	,039
	DKI	,160	,164	,147	,975	,336
	KI	,100	,080	,221	1,243	,222
	KA	-,099	,035	-,453	-2,816	,008
	SIZE	,021	,009	,409	2,229	,032

a. Dependent Variable: ETR

### Lampiran 14

#### Hasil Uji Koefisien Determinasi

##### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,491 <sup>a</sup>	,241	,154	,060897753377 488

a. Predictors: (Constant), SIZE, DKI, KA, KI

b. Dependent Variable: ETR

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.